

repository.ub.ac.id

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 10
TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN
KEPARIWISATAAN**

(STUDI PADA DPRD KABUPATEN MALANG)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana

Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang

LUTHFI KAMIL

NIM. 145030100111075



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG**

2018

MOTTO

“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, sesungguhnya kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman”

(Q.S AL-Imran:139)

“Make impossible become I’m possible”

(Luthfi Kamil)

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Studi Pada DPRD Kabupaten Malang)

Disusun oleh : Luthfi Kamil

NIM : 145030100111075

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Prodi : Ilmu Administrasi Publik

Malang, 5 November 2018

Komisi Pembimbing,


Dr. Bambang Santoso Harvono, MS
NIP. 19610204 198601 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 14 November 2018

Mahasiswa



Nama : Luthfi Kamil

NIM : 145030100111075

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 6 Desember 2018
Waktu : 08.00 – 09.00 WIB
Skripsi Atas Nama : Luthfi Kamil
Judul : Partisipasi Masyarakat Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Studi Pada DPRD Kabupaten Malang)

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua



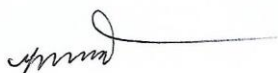
Dr. Bambang Santoso Harvono, MS.
NIP. 19610204 198601 1 001

Anggota



Dr. Abdullah Said, M.Si
NIP.19570911 198503 1 003

Anggota



Drs. Minto Hadi, M.Si
NIP. 19540127 198103 1 003

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, puji dan syukur atas kehendak dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang selalu memberikan rahmat, taufiq, pertolongan, dan hidayah-Nya kepada penulis dalam setiap langkah dalam kehidupan ini. Terima kasih atas segala nikmat kehidupan yang telah engkau berikan.

Saya persembahkan skripsi ini kepada orang yang paling berpengaruh didalam hidup saya, Ibu dan Bapak yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata indah lantunan do'a dan tiada do'a yang paling mustajab selain do'a dari orang tua.

Untuk dosen pembimbing, penguji, dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas untuk menuntun dan mengajarkan saya, memberikan bimbingan, dan ilmu yang bermanfaat yang tak ternilai, agar saya menjadi lebih baik. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak dan Ibu Dosen.

Untuk teman-teman saya, tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tak akan mungkin aku berada sampai disini. Terimakasih untuk canda tawa dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah terukir selama ini.

Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, untuk semua yang telah diberikan, akhir kata saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang saya sayangi yang telah berjasa dalam hidup saya.

RINGKASAN

Luthfi, Kamil, 2018. **Partisipasi Masyarakat Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Studi Pada DPRD Kabupaten Malang)**, Skripsi, 1) Dr Bambang Santoso Haryono, MS.

Peraturan Daerah merupakan salah satu bentuk kebijakan publik yang dibentuk oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah yang memiliki tujuan untuk mengatur dan memberikan kesejahteraan untuk masyarakat. Selain peran aktif pemerintah, partisipasi masyarakat juga diperlukan didalam pembentukan sebuah peraturan daerah. Kabupaten Malang merupakan salah satu daerah yang menerapkan partisipasi masyarakat didalam proses pembentukan peraturan daerahnya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berlokasi di Kabupaten Malang, sedangkan situsnya berlokasi di DPRD Kabupaten Malang. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sudah berpartisipasi aktif didalam rancangan peraturan daerah tersebut. Namun masih terdapat beberapa kendala didalam proses partisipasinya. Bentuk partisipasi dari masyarakat masih berbentuk lisan saja dan masyarakat dapat berpartisipasi ketika proses sosialisasi rancangan peraturan daerah berlangsung. Tingkat partisipasi masyarakat berada pada tingkatan semu, dimana partisipasi mereka tidak terlalu berpengaruh terhadap rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas.

Berdasarkan beberapa masalah yang ditemukan, diperlukan beberapa hal yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat didalam proses pembentukan peraturan daerah. Seperti lebih mengifisiensikan waktu, menggunakan teknologi yang ada, memberikan respon yang lebih baik lagi terhadap masukan dari masyarakat, dan dari pemerintah diharapkan untuk lebih terjun ke lapangan melihat kondisi yang sebenarnya

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Pembentukan Peraturan Daerah

SUMMARY

Luthfi, Kamil, 2018. **Society Participation in Malang Regency Region Regulation Program Number 10 Year 2013 about Implementation of Tourism (Study in Assembly of Regional Malang Regency)**, Mini thesis, 1) Dr. Bambang Santoso Haryono, MS

Region regulation is one of public policy form which made by government especially region government, that has a purpose to control and give prosperity for society. Beside government, society participation is needed in region regulation forming. Malang Regency is one of the region that applying society participation in their region regulation forming.

This research uses descriptive research with qualitative approach that take a place in Malang Regency, while the site in Assembly of Regional Malang Regency. Data collection technique using interview, observation, and documentation.

The result of this research shows that society was involved in the process of this regulation program. But there was an obstacle on those process. The form of the participation was just oral participation and society could participating when socialization of the region regulation plan. The degree of society participation on the appearance degree, which is their participation doesn't affected too much on that regulation forming.

Based on those problem on the research, still needed many things that has a purpose to increase the society participation in the regulation forming process. Such a time efficiency, using the technology, giving a good response to the society participation, and enter a field to the society to know the real situation.

Key Words: Society Participation, Region Regulation Forming.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada hamba-Nya dan tak lupa kita kirim salam dan shalawat kepada baginda Nabi Muhammad S.A.W yang telah membawakan kita suatu ajaran yang bermanfaat bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam memperoleh sarjana Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya dengan menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Partisipasi Masyarakat Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Studi Pada DPRD Kabupaten Malang)”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Saya menyadari bahwa penyusunan skripsi tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dukungan yang diberikan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin mengungkapkan rasa dan ucapan terimakasih sebesar besarnya kepada:

1. Orang tua penulis, terima kasih yang tiada tara saya haturkan kepada kedua orang tua yang saya cintai dan saya sayangi, Bapak saya H. G. Soepriyono, S.E dan Ibu saya Hj. Nadhiryana Fatmasari, S.E yang telah menjaga dan membesarkan saya hingga saya telah mencapai titik sekarang, yang telah memberikan segala dukungan dan doa yang tidak dapat saya balas dengan apapun.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR, MS selaku Rektor Universitas Brawijaya
3. Bapak Prof Dr. Bambang Supriyono, MS selaku dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik.

5. Bapak Drs. Fadillah Amin, MAP selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik
6. Bapak Dr. Bambang Santoso Haryono, MS selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan serta kemudahan dalam proses penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya yang telah memberikan bimbingan, saran, dan motivasi selama ini.
8. Pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Malang, Dinas Pariwisata Kabupaten Malang, dan masyarakat yang sudah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian, atas kerjasamanya sehingga memberikan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Teman-teman saya Adit, Gilang, Rhega, Inan, dan teman-teman Administrasi Publik 2014 lainnya yang telah memberikan bantuan dan semangat satu sama lain.
10. Teman-teman masa sekolah saya yang tetap menjaga silaturahmi dan memberikan semangat kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih

Demi memperbaiki skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Malang, 14 November 2018

Penulis

DAFTAR ISI

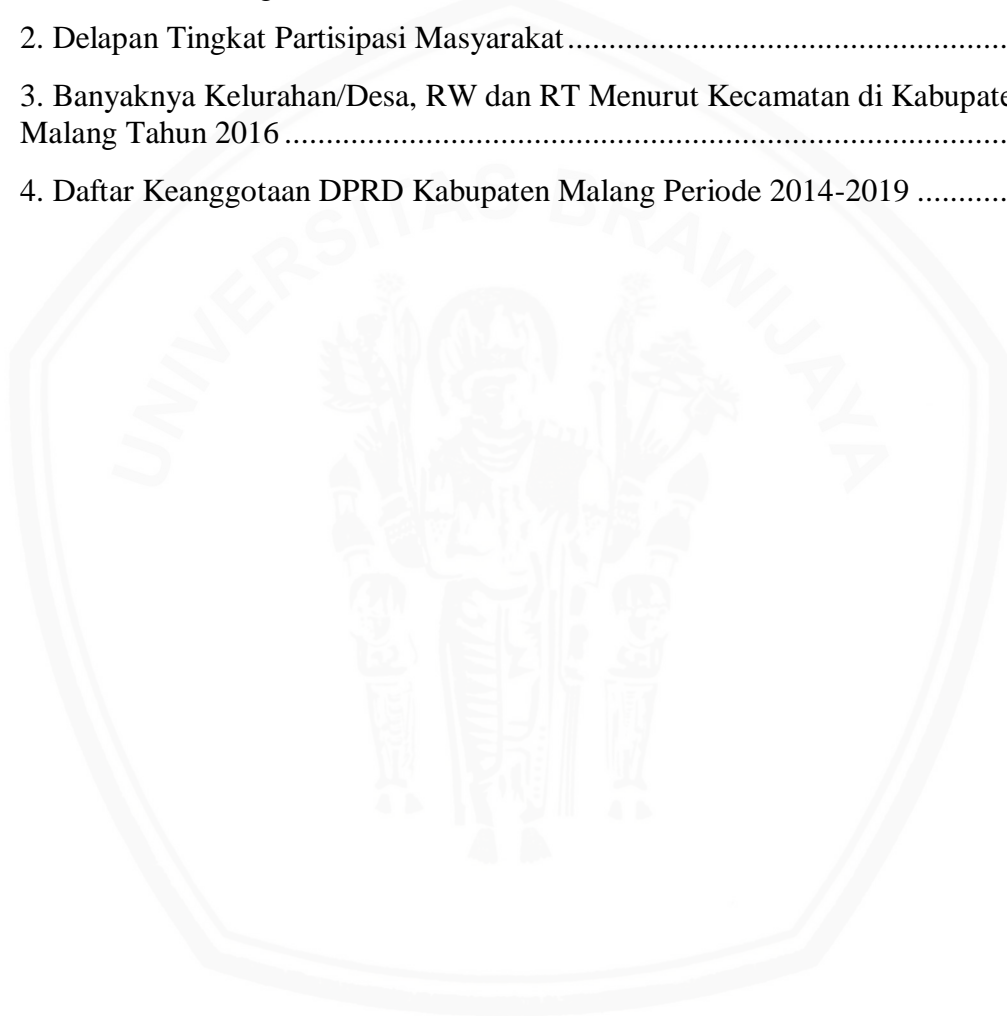
	Halaman
MOTTO.....	ii
TANDA PERSETUJUAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
RINGKASAN.....	vii
SUMMARY	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kontribusi Penelitian.....	13
E. Sistematika Penulisan	13
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 15
A. Kebijakan Publik.....	15
1. Pengertian Kebijakan Publik	15
2. Aktor-Aktor Kebijakan Publik	16
3. Tahap-Tahap Kebijakan Publik.....	18
B. Partisipasi Masyarakat.....	19
1. Definisi Partisipasi Masyarakat.....	19
2. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat	21
3. Sifat dan Ciri Partisipasi Masyarakat	22
4. Efektivitas Partisipasi Masyarakat	23
5. Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat	24
C. Peraturan Daerah	25
1. Definisi Peraturan Daerah	25
2. Asas Pembentukan Peraturan Daerah	27
3. Materi Muatan Peraturan Daerah	28
D. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah	29
1. Bentuk Partisipasi Masyarakat	29
2. Tingkatan Partisipasi Masyarakat	30
 BAB III METODE PENELITIAN	 33
A. Jenis Penelitian	33

B. Fokus Penelitian	34
C. Lokasi dan Situs Penelitian	35
D. Jenis dan Sumber data	36
E. Metode Pengumpulan Data	39
F. Instrumen Penelitian	41
G. Metode Analisis	43
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Gambaran Umum	46
1. Gambaran Umum Kabupaten Malang	46
2. Gambaran Umum DPRD Kabupaten Malang	52
3. Gambaran Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Malang	55
4. Gambaran Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	62
B. Penyajian Data	69
1. Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013	69
a. Proses Pembentukan Peraturan Daerah	69
b. Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah	75
c. Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat	86
d. Tingkatan Partisipasi Masyarakat	91
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi	93
a. Faktor Pendukung	93
b. Faktor Penghambat	98
C. Pembahasan	104
1. Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013	104
a. Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat	106
b. Tingkatan Partisipasi Masyarakat	108
2. Faktor Pendukung dan Penghambat	111
 BAB V KESIMPULAN	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran	116
 DAFTAR PUSTAKA	118

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Daftar Perda atau Perkada Kabupaten/Kota yang Dicabut atau Direvisi oleh Menteri Dalam Negeri	8
2. Delapan Tingkat Partisipasi Masyarakat.....	32
3. Banyaknya Kelurahan/Desa, RW dan RT Menurut Kecamatan di Kabupaten Malang Tahun 2016	50
4. Daftar Keanggotaan DPRD Kabupaten Malang Periode 2014-2019	53



DAFTAR GAMBAR

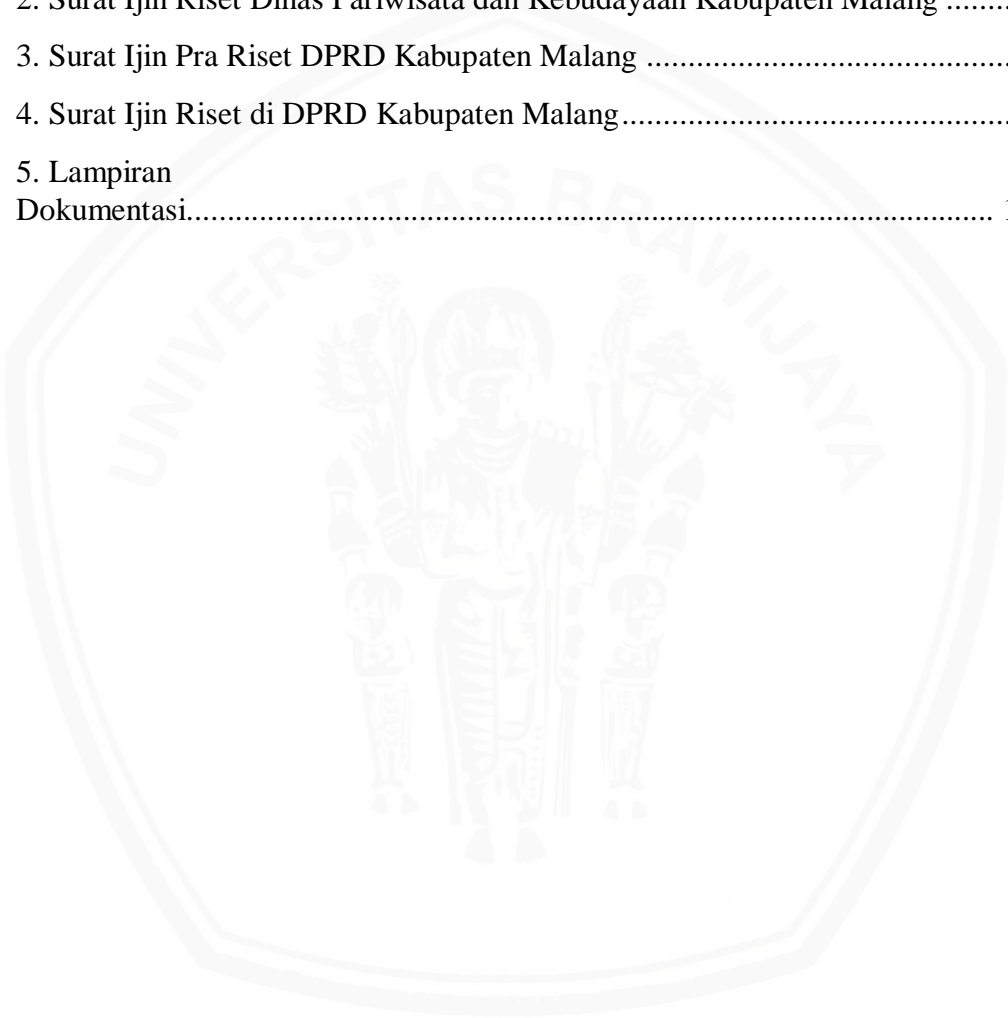
Gambar Halaman

1. Analisis Data Cresswell	44
2. Lambang Kabupaten Malang.....	48
3. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Malang	62
4. Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata	77
5. Pihak yang Diundang Dalam Proses Sosialisasi.....	79
6. Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	82
7. Peserta Memberikan Masukan Didalam Proses Sosialisasi	88
8. Bentuk Partisipasi Masyarakat Didalam Menjaga dan Merawat Tempat Wisata	91
9. Sosialisasi Secara <i>Door to Door</i> oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	97
10. Pembagian File Ketika Proses Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	100

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1. Draft Wawancara	123
2. Surat Ijin Riset Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang	125
3. Surat Ijin Pra Riset DPRD Kabupaten Malang	126
4. Surat Ijin Riset di DPRD Kabupaten Malang.....	127
5. Lampiran Dokumentasi.....	128



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan publik merupakan segala hal yang dilakukan atau segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang memiliki pengaruh terhadap masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Thomas R. Dye dalam Abdul Wahab (2011:46) merumuskan kebijakan publik sebagai “semua pilihan atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan publik itu menyangkut apapun yang dilakukan pemerintah, baik untuk melakukan sesuatu ataupun untuk tidak berbuat sesuatu.” Dalam kebijakan publik mampu dilakukan hal-hal seperti menganalisa proses pembentukan, substansi kebijakan, dan pengaruh kebijakan tersebut. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa pembentukan peraturan Perundang-Undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan.

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan hal yang sangat rumit (kompleks) sekali. Kebijakan juga merupakan perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pembicaraan tentang kebijakan memang tidak lepas dari kaitan kepentingan antar kelompok, baik di tingkat

pemerintahan maupun masyarakat secara umum (Anderson, 1979 dalam Dwiyanto, 2016:17). Dalam proses pembuatan kebijakan publik sendiri, sangat dibutuhkan partisipasi masyarakat didalamnya, karena kebijakan publik dibuat untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Partisipasi masyarakat dibutuhkan untuk memberikan masukan baik lisan maupun tertulis kepada pembuat kebijakan. Berdasarkan pasal 166 ayat 1 Permendagri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah disebutkan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan perda, perkara, PB KDH dan/atau peraturan DPRD. Karena masyarakat sendiri yang mengetahui bagaimana masalah sebenarnya yang sedang mereka hadapi.

Masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi didalam penyusunan kebijakan publik. Sehingga pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi didalam proses penyusunan kebijakan publik. Hal ini juga dijelaskan didalam pasal 166 ayat 3 Permendagri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dijelaskan bahwa masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi rancangan perda, perkara, PB KDH dan/atau peraturan DPRD. Konsep partisipasi merupakan konsep yang berkaitan dengan konsep keterbukaan. Maksudnya, tanpa adanya proses keterbukaan, masyarakat tidak bisa menyalurkan aspirasinya didalam proses pembentukan peraturan daerah.

Prinsip keterbukaan sendiri menjadi faktor penting bagi pemerintah untuk menjalankan proses pemerintahan yang baik dan demokratis. Maka dari itu, konsep partisipasi masyarakat ini juga berkaitan dengan konsep demokrasi. Dimana inti dari konsep demokrasi adalah masyarakat berhak memberikan masukan kepada pemerintah baik berupa lisan maupun tertulis. Didalam konsep demokrasi mewajibkan pemerintah untuk bersikap terbuka terhadap kritik atau pendapat yang disampaikan oleh masyarakat. Segala kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah harus tetap dibawah kontrol masyarakat.

Partisipasi sebagai nilai dasar demokrasi menjadi perhatian penting didalam proses pembuatan kebijakan publik. Pemerintah dituntut tidak hanya meningkatkan kekuatan politik dan administrasinya saja, tetapi juga memperkuat kerjasama dengan masyarakat selaku aktor penting didalam pembuatan kebijakan publik. Pemerintah seharusnya berbagi kewenangan dengan masyarakat dan mengurangi proses kendali terhadap masyarakat serta membuat rasa kepercayaan masyarakat tinggi terhadap pemerintah melalui proses kerjasama tersebut. Tujuan utama dari kerjasama antara pemerintah dan masyarakat itu sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan, tujuan, dan sasaran bersama.

Salah satu bentuk kebijakan publik yang memerlukan partisipasi masyarakat dalam pembentukannya adalah Peraturan Daerah (Perda). Didalam Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah pasal 1 ayat 4, Peraturan Daerah Provinsi atau

nama lainnya dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. Berdasarkan pendapat dari Bagir Manan sebagaimana dikutip Febby Fajrurrahman (2007:18), bahwa peraturan daerah (Perda) diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintahan daerah atau salah satu unsur pemerintahan daerah yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan tingkat daerah. Undang-Undang digunakan sebagai instrumen yuridis didalam penyelenggaraan pemerintah untuk menetapkan atau membentuk suatu peraturan daerah.

Keberadaan peraturan daerah merupakan sebuah hal yang harus dimiliki oleh suatu pemerintahan daerah didalam proses pelaksanaan suatu pemerintahan daerah. Peraturan daerah harus dijadikan acuan bagi pemerintah daerah didalam melaksanakan tugas dan fungsinya (Suko Wiyono, 2006:123). Hal ini sesuai dengan Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan di daerah otonomi nya masing-masing. Fungsi dan kedudukan Peraturan Daerah (Perda) berbeda antara yang satu dengan yang lainnya sesuai dengan materi atau muatan tergantung luas sempitnya urusan yang ada pada pemerintah daerah.

Demikian juga terhadap mekanisme pembentukan dan pelaksanaan perubahan seiring dengan perubahan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dan juga kondisi masyarakat dimana peraturan daerah tersebut di implementasikan. Selain peran aktif pemerintah didalam merumuskan peraturan daerah, peran atau partisipasi masyarakat juga diperlukan didalam pembentukan peraturan daerah. Sehingga peraturan daerah yang dibuat untuk rakyat, benar benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Hal ini sudah jelas tertulis didalam Pasal 166 ayat (1) Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang menyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan perda, perkara, PB KDH dan/atau peraturan DPRD.

Menurut Alex Warouw (2014:10-11), pada tahap pembentukan peraturan daerah (Perda), bentuk partisipasi masyarakat yang bisa dilakukan dalam beberapa hal, antara lain:

a. Audiensi

Audiensi dapat dilakukan baik atas kemauan masyarakat sendiri atau permintaan dari pihak DPRD. Apabila atas keinginan dari masyarakat sendiri, maka masyarakat dapat menggunakan alat kelengkapan yang ada di DPRD seperti Komisi, Panitia Khusus, Fraksi, dan sebagainya. Dan apabila audiensi tersebut diprakarsai oleh pihak DPRD, maka pihak DPRD dapat melakukan kegiatan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).

b. RUU Alternatif

Hal ini dapat dilakukan oleh masyarakat ketika peraturan yang tengah dibahas belum atau tidak aspiratif terhadap kepentingan masyarakat. Hal ini diatur dalam UU No.12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-Undangan.

c. Masukan Melalui Media Cetak ataupun Elektronik

Partisipasi masyarakat yang dilakukan melalui media cetak ataupun elektronik dengan membuat suatu opini, kritik, atau saran

terhadap suatu permasalahan yang akan dikaji. Opini masyarakat bisa berupa artikel, jumpa pers, wawancara, pernyataan-pernyataan, maupun berupa berita di surat kabar ataupun majalah. Karena semakin berkembangnya zaman, hal ini dirasa semakin mempermudah mereka didalam menyampaikan aspirasi nya.

d. Partisipasi dalam bentuk Diskusi, Lokakarya, dan Seminar

Masalah-masalah yang ada di masyarakat dapat di diskusikan dengan pihak DPRD langkah selanjutnya yang akan diambil. Hal ini dilaksanakan supaya masyarakat memperoleh kejelasan persoalan terhadap permasalahan yang sedang dibahas. Sehingga hasil dari diskusi, seminar, dan lokakarya adalah mendapatkan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang sedang dibahas.

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Bagir Manan (2001:85-86),

partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan cara:

1. Memasukkan atau mengikut sertakan dalam tim atau kelompok kerja penyusunan Perda
2. Melakukan dengar pendapat atau mengundang didalam rapat penyusunan Perda
3. Melakukan pengujian kepada pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan respon atau tanggapan
4. Melakukan *workshop* atas rancangan peraturan yang dibuat sebelum secara resmi dibahas oleh pihak DPRD
5. Mempublikasikan rancangan peraturan supaya mendapat tanggapan dari masyarakat

Untuk Indonesia sendiri, didalam menciptakan peraturan daerah yang partisipatif masih menghadapi berbagai kendala. Seperti adanya konflik kepentingan, lemahnya kapasitas berjaring, pengetahuan tentang hukum, keterbatasan pengetahuan tentang substansi yang sedang dibahas, kesadaran akan pentingnya partisipasi, dan lain-lain. Saat ini kendala terbesar yang dihadapi adalah belum secara tegas diatur tentang kewajiban adanya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan peraturan daerah. Hal ini terkesan hanya para birokrat pemerintahan dan anggota DPRD

yang aktif didalam proses pembentukan peraturan daerah. Menurut Praptanugraha (2008:470), fungsi dari mengikutsertakan pihak-pihak diluar DPRD dan pemerintah daerah untuk pembentukan peraturan daerah antara lain:

- a. Mengetahui keahlian, pengalaman, dan pengetahuan masyarakat sehingga peraturan daerah benar-benar memenuhi syarat sebagai Perundang-Undangan yang baik.
- b. Karena melibatkan masyarakat, maka dapat menjamin peraturan daerah sesuai dengan kenyataan hidup di masyarakat.
- c. Menumbuhkan *sense of belonging* (rasa memiliki) dan rasa bertanggung jawab atas peraturan daerah tersebut.

Salah satu akibat dari tidak ikut sertanya masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah adalah dicabut atau dibatalkannya peraturan daerah yang sudah ditetapkan tersebut. Selain itu akibat dari tidak adanya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah tersebut adalah adanya kontroversi dan masalah pada tingkat implementasinya di masyarakat (Muhiddin, 2013:2).

Indonesia sendiri didalam proses pembentukan maupun didalam pelaksanaan peraturan daerah masih mengalami banyak kendala. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya peraturan daerah yang dicabut ataupun di revisi. Pada tahun 2016, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) secara resmi telah mengunggah 3.143 peraturan daerah yang dibatalkan pemerintah pusat termasuk didalamnya peraturan menteri dalam negeri (Permendagri). 67,5 persen peraturan daerah tersebut terkait investasi, 15 persen bertentangan dengan Undang-Undang diatasnya, dan sekitar 10-15 persen soal diskriminasi atau intoleransi (www.Kemendagri.co.id, diakses

tanggal 26 Maret 2018). Berdasarkan pernyataan tersebut, menggambarkan masih banyaknya peraturan daerah yang bermasalah baik dalam pembentukan ataupun dalam implementasinya.

PROVINSI	JUMLAH	PROVINSI	JUMLAH
Jawa Timur	142	Yogyakarta	43
Jawa Barat	136	Lampung	40
Sumatera Utara	133	Banten	36
Jawa Tengah	123	Papua	34
Sulawesi Selatan	121	Bengkulu	33
Kalimantan Tengah	73	Kep. Riau	28
Kalimantan Barat	69	Sulawesi Tengah	28
Kalimantan Selatan	67	Maluku	25
Kalimantan Timur	66	Bali	23
Aceh	65	Maluku Utara	20
Sumatera Barat	60	Papua Barat	19
Sumatera Selatan	60	Sulawesi Barat	13
Riau	53	Sulawesi Utara	11
NTB	53	Gorontalo	5
Sulawesi Tenggara	49	Kalimantan Utara	4
NTT	45	DKI Jakarta	2
Jambi	43		

Bangka Belitung	43
-----------------	----

Tabel 1. Daftar Perda atau Perkada Kabupaten/Kota yang Dicabut atau Direvisi oleh Menteri Dalam Negeri

Sumber: HukumOnline.com (diakses tanggal 26 Maret 2018)

Dari 3.143 peraturan daerah yang dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri tersebut, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono menjelaskan bahwa Jawa Timur berada di peringkat pertama dengan 142 peraturan daerah, lalu diikuti Jawa Barat sejumlah 136 Perda, Sumatera Utara 133 Perda, dan Jawa Tengah sejumlah 123 perda (Viva.co.id, diakses tanggal 26 Maret 2018).

Kabupaten Malang sebagai kabupaten terluas kedua di Jawa Timur, juga memiliki permasalahan didalam proses pembentukan maupun penerapan peraturan daerahnya. Dari 142 peraturan daerah Jawa Timur yang dicabut atau di revisi, empat diantaranya merupakan peraturan daerah Kabupaten Malang. 4 perda tersebut antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Malang, Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, serta Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Nasional Tempo.co, diakses tanggal 26 Maret 2018).

Selain peraturan daerah yang dicabut tersebut, Kabupaten Malang masih memiliki beberapa permasalahan yang terjadi didalam pelaksanaan peraturan daerahnya. Salah satu peraturan daerah Kabupaten Malang yang masih bermasalah didalam penerapannya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bakti Maulana Rosyid (2015:92-96), menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2013 masih memiliki beberapa masalah, antara lain:

1. Sumber daya manusia yang dimiliki masih dianggap kurang memiliki kemampuan dalam urusan pengelolaan kepariwisataan. Masih lemahnya sumber daya manusia (SDM) pengelola kekayaan sumber daya alam (SDA) yang berpotensi baik di tingkat pusat, daerah, dan masyarakat mengakibatkan pembangunan destinasi yang kurang memperhatikan kepentingan dan manfaat pada masyarakat lokal, maka akan mengurangi dukungan dan partisipasi masyarakat.
2. Masalah juga ada didalam partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata yang dimiliki. Masyarakat lokal tidak peduli mengenai pembangunan destinasi pariwisata. Selain itu juga terdapat masyarakat yang memiliki sifat rasa kepemilikan yang berlebih didalam lahan yang dimilikinya. Hal ini menyulitkan pemerintah daerah untuk berkoordinasi dengan masyarakat terkait program-program pemerintah daerah dibidang kepariwisataan.

Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Isnabea (2017:54-60), menemukan bahwa dalam penerapan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata berkaitan dengan partisipasi masyarakat didalam penyelenggaraan kepariwisataan yang mengambil studi pada Agrowisata di Desa Poncokusumo masih terdapat beberapa permasalahan antara lain:

1. Dalam pengelolaan agrowisata, masyarakat desa Poncokusumo sebagian besar masih belum mengetahui dan mengerti tentang peraturan daerah yang mengatur bagaimana agrowisata dikembangkan. Karena sebagian masyarakat tidak mengerti tentang peraturan daerah ini, maka sebagian besar masyarakat tidak ikut didalam proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pengembangan agrowisata di desa tersebut.
2. Budaya yang melekat di masyarakat juga berpengaruh terhadap bagaimana partisipasi masyarakat didalam pengembangan kawasan wisata tersebut. Masyarakat terdahulu yang masih memiliki budaya yang kuat tidak terlalu menggubris tentang peraturan daerah penyelenggaraan kepariwisataan ini. Karena pada dasarnya pemikiran masyarakat tentang lahan yang ada hanyalah di rawat hingga membuahkan hasil dan hasilnya cukup dijual kepada pemasok. Budaya inilah yang menghambat perkembangan sektor kepariwisataan di desa tersebut.

Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat masih belum mengerti dan mengetahui bahwa terdapat peraturan daerah yang mengatur bagaimana penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan.

Berdasarkan uraian latar belakang dan juga permasalahan yang sudah dijelaskan diatas, maka penulis memilih melakukan penelitian yang berjudul **“PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN (Studi pada DPRD Kabupaten Malang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan maka rumusan masalah yang ada yaitu:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat Kabupaten Malang didalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat didalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut penelitian bertujuan untuk:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana partisipasi masyarakat Kabupaten Malang didalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan.
2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat didalam rancangan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan.

D. Kontribusi Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang dapat diterima oleh semua pihak terkait penelitian ini. Adapun kontribusi penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Kontribusi Teoritis

- a. Dapat digunakan sebagai sumbangan dalam Ilmu Administrasi Publik terkait dengan partisipasi masyarakat dalam rancangan sebuah peraturan daerah.
- b. Sebagai rujukan bagi penelitian selanjutnya tentang partisipasi masyarakat dalam rancangan peraturan daerah.

2. Kontribusi Praktis

- a. Bagi Instansi Terkait

Sebagai bahan masukan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah.

- b. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan kajian masyarakat untuk mengetahui bagaimana pentingnya partisipasi masyarakat didalam proses pembentukan peraturan daerah dan sejauh mana partisipasi mereka didalam proses pembentukan peraturan daerah.

E. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang yang menerangkan ruang lingkup dan kedudukan masalah yang akan diteliti dalam bentuk deskriptif, dari lingkup yang paling umum sehingga merujuk ke masalah yang paling spesifik. Kemudian yang selanjutnya yaitu identifikasi masalah, dalam hal ini identifikasi masalah mendeteksi aspek permasalahan yang muncul dan berkaitan dari tema/topik penelitian. Pembahasan masalah dan perumusan masalah dari hasil identifikasi tersebut ditetapkan masalah yang paling urgen yang berkaitan dengan judul penelitian, maksud dan tujuan penelitian, dalam hal ini mengungkapkan tentang sasaran yang ingin dicapai dengan dilaksanakan penelitian. Kemudian terdapat juga kegunaan penelitian yang menjelaskan manfaat teoritis dan praktis dari penelitian yang akan diteliti dan yang terakhir yaitu sistematika penulisan yang menjelaskan isi dari bab per bab yang ada dalam penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Deskripsi tinjauan pustaka tentang berbagai teori yang relevan dengan permasalahan yang ada

BAB III: METODE PENELITIAN

Terdiri dari metode penelitian yang menjelaskan tentang penggunaan metode yang digunakan. Instrumen penelitian menjelaskan tentang proses penyusunan dan jenis alat pengumpulan data. Populasi dan sampel penelitian menjelaskan teknik pengambilan sampel data. Teknik pengolahan dan analisa menjelaskan tentang teknik analisa beserta rasionalitasnya. Terakhir tentang tempat dan waktu penelitian tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Eyestone (1971) dalam Abdul Wahab (2012:13), secara luas kebijakan publik ialah hubungan yang berlangsung diantara unit/satuan pemerintahan dengan lingkungannya. Menurut Wilson (2006:154) merumuskan kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah/sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi).

Konsep kebijakan publik ini kemudian mempunyai beberapa pengertian menurut Anderson dalam Winarno (2012:2003) diantaranya adalah:

- a. Bahwa titik perhatian dalam membahas masalah kebijakan publik berorientasi pada maksud dan tujuan.
- b. Kebijakan merupakan suatu arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang tersendiri.
- c. Kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah.
- d. Kebijakan publik dapat bersifat positif maupun negative.
- e. Secara negatif kebijakan mencakup suatu keputusan oleh pejabat-pejabat pemerintah tetapi tidak untuk mengambil tindakan dan tidak untuk melakukan sesuatu mengenai persoalan yang memerlukan keterlibatan pemerintah.

- f. Dalam bentuknya yang positif, kebijakan publik didasarkan pada Undang-Undang dan bersifat otoritatif.

Dari pengertian-pengertian diatas, dapat diartikan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan pemerintah dalam membuat suatu keputusan untuk menjalankan tugas dan kewajibannya dalam pemerintahan dengan tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

2. Aktor-Aktor Kebijakan Publik

Menurut Charles O. Jones dalam Abdul Wahab (2014:88) dalam proses kebijakan sedikitnya ada empat golongan atau tipe aktor yang terlibat dalam proses kebijakan, antara lain:

- a. Golongan Rasional
Identik dengan peran yang dimainkan oleh para perencana dan analisis kebijakan profesional yang amat terlatih dalam menggunakan metode-metode rasional apabila menghadapi masalah-masalah. Gaya kerja golongan rasional cenderung seperti gaya kerja seorang perencana yang komprehensif, yakni dengan berusaha untuk menganalisis semua aspek dari setiap isu yang muncul.
- b. Golongan Teknisi
Golongan ini tidak lebih dari seorang rasionalis karena bidang keahliannya atau spesialisasinya dilibatkan dalam beberapa tahapan proses kebijakan. Tujuan yang ingin dicapai biasanya ditetapkan oleh pihak lain. Gaya kerja dari golongan teknis ini umumnya menunjukkan rasa antusiasme dan percaya diri yang tinggi apabila mereka diminta untuk bekerja.
- c. Golongan Inkrementalis
Golongan ini identik dengan para politis yang cenderung memiliki sikap kritis, namun sering tidak sabar. Golongan inkrementalis memandang tahap-tahap perkembangan kebijakan dan implementasinya sebagai suatu rangkaian proses penyesuaian yang terus terhadap hasil akhir. Gaya kerja golongan ini dapat dikategorikan sebagai seorang yang mampu melakukan tawar-menawar, yakni intensitas tuntutan tersebut dan menawarkan kompromi.
- d. Golongan Reformis

Nilai-nilai yang mereka junjung tinggi ialah yang berkaitan dengan upaya untuk melakukan perubahan sosial, namun lebih bersangkut paut dengan kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Tujuan kebijakan biasanya ditetapkan dalam lingkungan kelompok-kelompok tersebut, melalui berbagai proses. Gaya kerja golongan aktor reformis ini umumnya sangat radikal, sering disertai dengan tindakan-tindakan demonstrasi dan konfrontasi dengan pihak pemerintah.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa didalam pembuatan kebijakan publik terdapat empat aktor seperti golongan rasional, golongan teknisi, golongan inkrementalis, dan golongan reformis. Aktor-aktor didalam proses pembuatan kebijakan publik harus saling bekerja sama supaya tujuan bersama yang mereka inginkan dapat tercapai. Golongan rasional dan teknisi harus mampu menganalisa berbagai permasalahan yang ada didalam proses pembentukan kebijakan publik ataupun didalam implementasinya.

Sedangkan golongan inkrementalis dengan kekuatan politiknya harus mampu menyampaikan aspirasi dari masyarakat untuk pembentukan kebijakan publik. Mereka harus menghilangkan kepentingan politiknya didalam proses pembuatan kebijakan publik. Golongan reformis merupakan golongan yang paling penting didalam proses pembuatan kebijakan publik. Karena suara atau aspirasi golongan ini merupakan dasar pembuatan kebijakan publik. Golongan yang diatas harus melibatkan golongan ini didalam proses pembuatan kebijakan publik. Golongan inilah yang mengerti bagaimana permasalahan sebenarnya di lapangan.

3. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Menurut Charles Lindblom dalam Winarno (2012:35), proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Menurut William Dunn dalam Winarno (2012:35) tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut:

- a. Tahap Penyusunan Agenda
Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan sebagai suatu fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.
- b. Tahap Formulasi Kebijakan
Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pada tahap ini masing-masing aktor akan “berperan” untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.
- c. Tahap Adopsi Kebijakan
Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.
- d. Tahap Implementasi Kebijakan
Suatu program kebijakan hanya akan menjadi kebijakan yang sia-sia, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementator), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.
- e. Tahap Evaluasi Kebijakan
Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan sebuah proses yang melibatkan beberapa peran antara

individu, kelompok, serta pemerintah dalam pembentukannya untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran tertentu. Sehingga kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan beberapa unsur dan bukan merupakan keputusan yang dibuat sendiri.

Didalam salah satu proses kebijakan publik yaitu formulasi kebijakan, masalah-masalah yang ada didalam masyarakat dibahas untuk dibuat kebijakannya. Maka dari itu pentingnya peran masyarakat supaya pihak pembuat kebijakan mengerti apa saja permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat tersebut. Kebijakan yang dibuat harus mampu mengatasi masalah-masalah tersebut.

B. Partisipasi Masyarakat

1. Definisi Partisipasi Masyarakat

Hal ini mengarah kepada apa yang terkandung didalam istilah partisipasi dan siapa yang terlibat didalam proses partisipasi. Siapa yang terlibat didalam proses partisipasi mengarah kepada pengertian dua hal, yaitu apa yang dimaksud masyarakat dan bagaimana kedudukan masyarakat didalam pemerintahan daerah. Partisipasi sendiri berasal dari bahasa latin "*participare*" yang memiliki arti peran serta, ikut serta, keterlibatan atau proses belajar bersama saling memahami, menganalisis, merencanakan, dan melakukan tindakan oleh sejumlah anggota masyarakat. Korten dalam Khairul Muluk (2006:39) menjelaskan istilah

masyarakat sebagai sekelompok orang yang memiliki kepentingan bersama. Masyarakat juga sebagai “interaksi populasi dari setiap individu yang tinggal di suatu daerah”.

Menurut Salusu (1998:8) partisipasi secara garis besar dapat dikategorikan sebagai desakan kebutuhan psikologis yang mendasar pada setiap individu. Hal ini berarti bahwa manusia ingin berada dalam suatu kelompok untuk terlibat dalam setiap kegiatan. Keikutsertaan ini sudah pasti didasari oleh motif-motif dan keyakinan akan nilai-nilai tertentu yang dihayati seseorang.

Partisipasi (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001:831), adalah peran serta atau keikutsertaan (mengawasi, mengontrol, dan mempengaruhi), dalam kaitannya dengan peraturan daerah adalah masyarakat dalam suatu kegiatan pembentukan peraturan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah.

Tujuan dasar dari peran serta masyarakat adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari warga negara dan masyarakat yang berkepentingan (*public interest*) dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, karena dengan melibatkan masyarakat yang potensial terkena dampak akibat kebijakan yang dibuat, para pengambil keputusan mendapatkan pandangan, kebutuhan, dan pengharapan dari masyarakat dan kelompok tersebut, untuk kemudian menuangkannya dalam suatu konsep.

2. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila terpenuhi adanya tiga faktor utama yang mendukungnya, yaitu kesadaran, kemampuan, dan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi (Dawam Raharjo, 1989:23). Dalam hal ini semangat dan kesadaran dari masyarakat menjadi faktor utama untuk faktor partisipasi masyarakat.

Santoso Sastropetro dalam Febby Fajrurrahman (2007:39) berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat antara lain:

- a. Pendidikan, kemampuan membaca dan menulis, kemiskinan, kedudukan sosial, dan percaya terhadap diri sendiri.
- b. Faktor lain adalah pengertian yang dangkal tentang agama.
- c. Mensalahartikan motivasi, tujuan, dan kepentingan-kepentingan organisasi penduduk yang biasanya mengarah kepada timbulnya persepsi yang salah terhadap keinginan dan motivasi serta organisasi penduduk.
- d. Tersedianya kesempatan kerja yang lebih baik di luar pedesaan.
- e. Tidak terdapatnya kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai program pembangunan.

Dalam mempengaruhi partisipasi masyarakat tidak hanya faktor pendukung saja, tetapi terdapat juga faktor penghambat dalam partisipasi masyarakat. Menurut Siti Irene Astuti (2011:57) bahwa faktor yang dapat menghambat atau menjadi ancaman terhadap partisipasi masyarakat adalah:

- 1) Sifat malas, apatis, masa bodoh, dan tidak mau melakukan perubahan di tingkat anggota masyarakat
- 2) Aspek-aspek tipologi
- 3) Geografis (pulau-pulau kecil yang tersebar tempatnya)
- 4) Demografis (jumlah penduduk)

5) Ekonomi (desa miskin/tertinggal)

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, baik itu faktor pendukung maupun faktor penghambat. Faktor-faktor penghambat didalam partisipasi masyarakat sebisa mungkin harus dihilangkan supaya partisipasi masyarakat berjalan dengan baik.

3. Sifat dan Ciri Partisipasi Masyarakat

Sifat dan ciri partisipasi masyarakat menurut Santoso Sastropetro dalam Febby Fajrurrahman (2007:41) adalah:

- a. Partisipasi haruslah bersifat sukarela.
- b. Berbagai isu atau masalah haruslah disajikan dan dibicarakan secara jelas dan obyektif.
- c. Kesempatan untuk berpartisipasi haruslah untuk mendapat keterangan/informasi yang jelas dan memadai tentang setiap segi/aspek dari program yang akan didiskusikan.
- d. Partisipasi masyarakat dalam rangka menentukan kepercayaan terhadap diri sendiri haruslah menyangkut berbagai tingkatan dan berbagai sector, bersifat dewasa, penuh arti, berkesinambungan, dan aktif.

Menurut Davis, dalam Talizuduhu Ndraha yang dikutip Febby Fajrurrahman (2007:41), ada tiga hal yang merupakan ciri-ciri partisipasi, antara lain:

- a. Titik berat partisipasi adalah mental dan emosional, kehadiran secara pribadi dalam suatu kelompok, tanpa keterlibatan tersebut bukanlah suatu partisipasi.
- b. Kesiediaan untuk memberikan kontribusi. Tujuan wujud kontribusi dalam partisipasi ada bermacam-macam, misalnya jasa, barang, uang, bahkan buah pikiran dan keterampilan.
- c. Keberanian untuk menerima tanggung jawab atas suatu usaha untuk atau mengambil bagian dalam pertanggungjawaban.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa sifat dan ciri dari partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat harus bersifat sukarela. Sukarela yang dimaksud disini adalah masyarakat berpartisipasi tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Masalah atau isu yang diberikan juga harus jelas dan rinci. Sehingga partisipasi masyarakat dapat berjalan secara maksimal. Titik berat dari partisipasi masyarakat adalah emosional atau kehadiran masyarakat didalam proses partisipasi tersebut.

4. Efektivitas Partisipasi Masyarakat

Keith Davis dalam Febby Fajrurrahman (2007:42) memberikan beberapa persyaratan untuk dapat melaksanakan partisipasi secara efektif, persyaratan tersebut antara lain:

- a. Waktu. Yang dimaksud waktu disini adalah waktu untuk memahami pesan yang disampaikan oleh pembuat kebijakan. Pesan tersebut mengandung informasi mengenai apa dan bagaimana serta mengapa diperlukan peran serta didalam partisipasi. Pesan-pesan itu disampaikan melalui komunikasi, yaitu usaha dan kegiatan untuk menumbuhkan pengertian yang sama antara pemrakarsa yang disebut komunikator dan penerima pesan/komunikan.
- b. Subyek partisipasi hendaklah relevan atau berkaitan dengan organisasi dimana individu yang bersangkutan itu tergabung atau sesuatu yang menjadi perhatiannya atau kepentingannya.
- c. Partisipan harus memiliki kemampuan untuk berpartisipasi, artinya memiliki pola pikir yang setara dengan komunikator.
- d. Partisipan harus memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi timbal balik, misalnya menggunakan bahasa yang sama atau mudah dipahami, sehingga tercipta pertukaran yang efektif/berhasil.
- e. Para pihak yang bersangkutan bebas dalam melaksanakan peran serta tersebut, sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Berdasarkan penjelasan tersebut terdapat beberapa hal yang dapat membuat partisipasi masyarakat dapat berjalan secara efektif, antara lain waktu untuk memahami sebuah materi, subyek partisipasi yang relevan terhadap permasalahan yang dibahas, partisipan mampu memberikan masukannya atau memberikan timbal balik, dan para partisipan diberikan kebebasan untuk memberikan partisipasinya sesuai aturan yang berlaku.

5. Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat

Talizuduhu Ndraha dalam Febby Fajrurrahman (2007:42), menyatakan bentuk-bentuk partisipasi diantaranya berupa:

- a. Partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran
Jenis partisipasi ini merupakan partisipasi berupa ide atau gagasan, saran dan pendapat, baik untuk menyusun program maupun untuk keberlangsungan suatu kegiatan dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan untuk mengembangkan kegiatan berlangsung.
- b. Partisipasi dalam bentuk materi
Jenis partisipasi ini merupakan sumbangan materi berupa uang, barang, dan penyediaan sarana atau fasilitas untuk kepentingan sebuah pelaksanaan program.
- c. Partisipasi yang bersifat *skill* / keahlian
Jenis partisipasi ini merupakan partisipasi yang berupa pemberian bantuan *skill* / ketrampilan yang dimiliki untuk perkembangan sebuah program.
- d. Partisipasi dalam bentuk tenaga fisik
Jenis partisipasi ini merupakan partisipasi berupa tenaga dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau untuk menunjang keberhasilan sebuah program, pertolongan bagi orang lain, dan partisipasi atas dasar sukarela tanpa adanya paksaan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan desakan kepentingan atau kebutuhan dari setiap individu ataupun kelompok. Masyarakat bisa memberikan partisipasinya didalam proses pembuatan kebijakan melalui penyampaian

masalah atau aspirasi yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Tidak ada kebijakan yang diambil tanpa adanya persetujuan dan partisipasi dari masyarakat. Hal ini menegaskan betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik. Tujuan dasar dari partisipasi masyarakat adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna bagi kepentingan masyarakat bersama.

Didalam pemerintahan daerah, terdapat beberapa bentuk partisipasi masyarakat antara lain masyarakat mampu memperluas isu kebijakan tersebut, masyarakat mampu berpartisipasi melalui unit-unit pemerintahan yang lebih kecil, musyawarah antar masyarakat, dan partisipasi melalui anggota dewan yang mereka pilih. Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan partisipasinya didalam proses pembuatan kebijakan atau keputusan. Partisipasi yang diberikan juga tidak hanya berupa pemikiran saja, tapi juga bisa berupa materi, skill/keahlian, dan tenaga fisik.

C. Peraturan Daerah

1. Definisi Peraturan Daerah

Pasal 1 ayat 4 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menjelaskan bahwa Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan

bersama kepala daerah. Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi serta merupakan peraturan yang dibuat untuk melaksanakan peraturan Perundang-Undangan yang ada di atasnya dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi serta Perda daerah lain.

Pasal 4 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menjelaskan bahwa Materi muatan Peraturan Daerah berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menjelaskan bahwa Produk hukum daerah berbentuk:

- a. Peraturan; dan
- b. Penetapan.

Selanjutnya dijelaskan di Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 bahwa Produk hukum daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. Perda;
- b. Perkada;
- c. PB KDH; dan

- d. Peraturan DPRD.

2. Asas Pembentukan Peraturan Daerah

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa Dalam membentuk Peraturan Perundang-Undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan, bahwa setiap pembentukan peraturan Perundang-Undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, bahwa setiap peraturan Perundang-Undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan Perundang-Undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-Undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, bila dibuat oleh lembaga /pejabat yang tidak berwenang.
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, bahwa dalam pembentukan peraturan Perundang-Undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan Perundang-Undangannya.
- d. Dapat dilaksanakan, bahwa setiap pembentukan peraturan Perundang-Undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan Perundang-Undangan tersebut didalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap peraturan Perundang-Undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. Kejelasan rumusan, dalam membentuk setiap peraturan Perundang-Undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan Perundang-Undangan, sehingga sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Keterbukaan, bahwa dalam proses pembentukan peraturan Perundang-Undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai

kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan Perundang-Undangan.

3. Materi Muatan Peraturan Daerah

Pasal 4 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menjelaskan bahwa Perda kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat materi muatan untuk mengatur:

- a. Kewenangan kabupaten/kota
- b. Kewenangan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota
- c. Kewenangan yang penggunaanya dalam daerah kabupaten/kota
- d. Kewenangan yang manfaat atau dampak negatif nya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau
- e. Kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari Perundang-Undangan yang ada diatasnya dan dalam dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama kepala daerah. Peraturan daerah juga harus memperhatikan ciri khas daerah masing-masing dan dilarang bertentangan dengan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

Sebuah peraturan daerah juga mengandung beberapa asas dan materi muatan didalamnya dimana hal-hal tersebut harus dipenuhi. Karena asas dan materi muatan berpengaruh terhadap keberhasilan sebuah peraturan ketika diterapkan.

D. Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah

1. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah

Berdasarkan pasal 166 ayat 1 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menjelaskan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan perda, perkara, PBKDH dan/atau peraturan DPRD. Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:

- a. Rapat dengar pendapat umum
- b. Kunjungan kerja
- c. Sosialisasi, dan/atau
- d. Seminar, lokakarya, dan/atau diskusi

Partisipasi dimaksudkan sebagai keikutsertaan pihak-pihak luar DPRD dan pemerintah daerah dalam menyusun dan membentuk rancangan peraturan daerah atau Perda. Menurut Praptanugraha (2008:470) ada dua sumber partisipasi, antara lain:

1. Dari unsur pemerintahan diluar DPRD dan pemerintah daerah seperti polisi, kejaksaan, pengadilan, perguruan tinggi, dan lain-lain
2. Dari masyarakat, baik individual seperti ahli-ahli atau yang memiliki pengalaman atau dari kelompok seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

2. Tingkatan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah

Arenstein (Ahmad, 2003:108), menyusun model yang dapat membantu untuk menilai tingkat partisipasi didalam suatu proses pembentukan kebijakan atau peraturan secara umum perundang-undangan/peraturan daerah. Secara umum ada tiga derajat partisipasi masyarakat, antara lain:

- 1) Tidak partisipatif (*Non participation*)
- 2) Derajat semu (*Degrees of tokenism*)
- 3) Kekuatan masyarakat (*Degrees of citizen power*)

Dasar penentuan derajat, bukan pada seberapa jauh masyarakat telah terlibat didalam proses pembentukan kebijakan atau program dilaksanakan oleh negara tetapi seberapa jauh masyarakat dapat menentukan hasil akhir atau dampak dari kebijakan atau program tersebut. Derajat terbawah partisipasi yaitu tidak partisipatif terdiri dari dua tingkat partisipasi, yaitu manipulasi (*manipulation*) dan terapi (*therapy*).

Didalam tingkat ini partisipasi hanya bertujuan untuk menata masyarakat dan mengobati luka timbul akibat dari kegagalan sistem dan mekanisme pemerintahan. Tidak ada niatan sedikit pun untuk melibatkan masyarakat dalam menyusun kegiatan atau program pemerintah. Derajat menengah (yang semu) terdiri dari tiga tingkat partisipasi, yaitu: pemberitahuan (*informing*), konsultasi (*consultation*), dan peredaman

(*placation*). Didalam tahap ini sudah ada perluasan kadar partisipasi, masyarakat sudah bisa mendengar (tingkat pemberitahuan) dan didengar (tingkat konsultasi), namun begitu tahap ini belum menyediakan jaminan yang jelas bagi masyarakat bahwa suara mereka diperhitungkan dalam penentuan hasil sebuah kebijakan publik. Sedangkan pada tahap peredaman memang sudah memungkinkan masyarakat pada umumnya khususnya yang rentan untuk memberikan masukan secara lebih signifikan didalam penentuan hasil kebijakan publik, namun proses pengambilan keputusan masih dipegang penuh oleh pemegang kekuasaan.

Derajat tertinggi yaitu kekuatan masyarakat terdiri dari tiga tingkat partisipasi, yakni kemitraan (*partnerships*), delegasi kekuasaan (*delegated power*), dan yang teratas adalah kendali masyarakat (*citizen control*). Dalam tahap ini partisipasi masyarakat termasuk yang rentan sudah masuk dalam ruang penentuan proses, hasil, dan dampak kebijakan. Masyarakat sudah bisa bernegosiasi dengan penguasa tradisional dalam posisi politik yang sejajar (tingkat kemitraan). Bahkan lebih jauh mampu mengarahkan kebijakan karena ruang pengambilan keputusan telah dikuasai (tingkat delegasi kekuasaan).

Sehingga pada tahap akhir partisipasi masyarakat telah sampai pada puncaknya, yaitu ketika masyarakat secara politik maupun administratif sudah mampu mengendalikan proses, pembentukan, pelaksanaan, dan kebijakan tersebut (tingkat kendali masyarakat). Untuk ringkasnya ditampilkan dalam bagan sebagai berikut:

Delapan Tingkat Partisipasi Masyarakat

1.	Kendali masyarakat (<i>citizen control</i>)	<i>Degrees of Citizen Power (Kekuasaan Masyarakat)</i>
2.	Delegasi Kekuasaan (<i>delegated power</i>)	
3.	Kemitraan (<i>partnership</i>)	
4.	Peredaman (<i>placation</i>)	<i>Degrees Tokenism (Semu)</i>
5.	Konsultasi (<i>consultation</i>)	
6.	Penginformasian (<i>information</i>)	<i>Nonparticipation (Tidak Partisipasi)</i>
7.	Terapi (<i>therapy</i>)	
8.	Manipulasi (<i>manipulation</i>)	

Tabel 2: Delapan Tingkat Partisipasi Masyarakat

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam suatu penelitian pada dasarnya memiliki sebuah tujuan-tujuan untuk memahami sebuah fenomena yang ada. Uraian yang jelas dan sistematis atas data-data yang akan dikumpulkan diharapkan dapat memberikan gambaran atau hasil yang jelas dalam meneliti sebuah fenomena yang ada. Penelitian adalah suatu usaha yang diupayakan untuk menangkap dan menyelesaikan sebuah fenomena yang ada berdasarkan suatu disiplin ilmu metodologi ilmiah, untuk dapat melihat atau menemukan prinsip-prinsip baru dibelakang fenomena yang terjadi.

Permasalahan yang dikaji oleh peneliti merupakan masalah yang bersifat dinamis. Oleh karena itu, peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menentukan cara untuk mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa data hasil penelitian tersebut. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif.

Penelitian kualitatif sendiri adalah penelitian yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik/utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan yang bersifat interaktif. Penelitian dilakukan pada obyek yang alamiah. Obyek yang alamiah adalah obyek yang berkembang

apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut (Sugiyono, 2016:8).

Penggunaan jenis penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan dan menjelaskan secara jelas dan tepat mengenai proses pembentukan peraturan daerah (Perda), partisipasi masyarakat dalam rancangan peraturan daerah (Perda), serta hal-hal pendukung serta penghambat yang dihadapi masyarakat Kabupaten Malang dalam berpartisipasi di dalam rancangan peraturan daerah (Perda) tersebut.

B. Fokus Penelitian

Penelitian kualitatif tidak menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Karena luasnya masalah, peneliti akan membatasi penelitian dalam satu atau lebih variabel yang disebut dengan batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus (Sugiyono, 2016:207). Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata di DPRD Kabupaten Malang:

- a. Berdasarkan pendapat dari Talizuduhu Ndraha dapat ditarik fokus yaitu bentuk-bentuk partisipasi masyarakat antara lain:
 1. Partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran
 2. Partisipasi dalam bentuk materi
 3. Partisipasi yang bersifat *skill* / keahlian
 4. Partisipasi dalam bentuk tenaga fisik
- b. Berdasarkan pendapat dari Arenstein dapat ditarik fokus yaitu tingkatan partisipasi yaitu:
 1. Tidak partisipatif (*Non Participation*)
 2. Derajat semu (*Degrees of Tokenism*)
 3. Kekuatan Masyarakat (*Degrees of Citizen Power*)
2. Faktor yang mendukung dan menghambat partisipasi masyarakat dalam rancangan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata di DPRD Kabupaten Malang:
 - a. Faktor Pendukung
 - b. Faktor Penghambat

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian. Berdasarkan lokasi penelitian ini nantinya diharapkan peneliti akan memperoleh data dan informasi sesuai dengan tema, masalah, dan

fokus penelitian yang telah ditetapkan. Lokasi penelitian mengambil tempat di Kabupaten Malang.

Situs penelitian adalah suatu kondisi dimana seorang peneliti dapat menangkap dan melihat suatu keadaan atau peristiwa yang nyata dari objek yang ditelitinya. Situs penelitian yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah di DPRD Kabupaten Malang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang, dan masyarakat yang berkaitan langsung dengan pariwisata di Kabupaten Malang.

Penelitian dilakukan di DPRD Kabupaten Malang karena peneliti ingin mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat didalam rancangan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan. Karena DPRD sebagai lembaga legislatif di daerah yang bertugas untuk merumuskan suatu peraturan daerah (Perda) dengan melihat permasalahan di masyarakat.

Sedangkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang merupakan pihak pelaksana teknis untuk mensosialisasikan rancangan peraturan daerah yang telah dibuat oleh pihak DPRD kepada masyarakat.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Pengumpulan data bisa menggunakan dua jenis data yang berbeda yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu:

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari pihak-pihak terkait atau sumber data objek penelitian. Data primer merupakan data berupa hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis. Selain itu peneliti juga melakukan observasi langsung ke lapangan. Jenis data ini meliputi informasi dan keterangan mengenai partisipasi masyarakat didalam rancangan peraturan daerah di DPRD Kabupaten Malang. Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dari Bagian Perundang-Undangan DPRD Kabupaten Malang, Kasi Pengendalian Jasa Sarana Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang, dan masyarakat yang berkaitan dengan pariwisata di Kabupaten Malang.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang telah dikumpulkan untuk maksud menyelesaikan masalah yang dihadapi. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti yang dapat memberikan informasi pendukung kepada peneliti. Sumber data sekunder ini dapat berupa dokumen, catatan, laporan, dan arsip yang relevan dengan penelitian ini. Beberapa data sekunder yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
3. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata
4. Dokumen tentang sosialisasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata

2. Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2011:157), sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data merupakan asal dari suatu data tersebut baik diperoleh dari seorang maupun dari suatu peristiwa yang dapat mendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian, sumber data dibagi menjadi tiga, antara lain:

a. Informan

Informan dalam hal ini yaitu orang yang bisa memberikan informasi lisan tentang sesuatu yang ingin kita ketahui. Peneliti bisa mendapatkan data dari informan melalui wawancara yang hasilnya dapat menjadi bahan pembahasan peneliti. Pihak-pihak yang berperan sebagai informan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bapak Agus Pitono Aji, S.Kom selaku Kepala Sub Bagian Produk Hukum DPRD Kabupaten Malang
2. Bapak Sudarto, selaku Staff Sub Bagian Produk Hukum DPRD Kabupaten Malang
3. Ibu Rahajoeningtias Toeti, S.Sos, MM selaku Kasi Pengendalian Usaha Jasa Sarana Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang
4. Bapak Suyanto selaku petugas pengelola kawasan wisata Candi Singosari

b. Dokumen

Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Bisa berupa rekaman atau dokumen tertulis seperti arsip data atau surat-surat dan rekaman yang berkaitan dengan suatu peristiwa.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Pengamatan (Observasi)

Dalam metode ini, peneliti melakukan pengamatan langsung dengan menggunakan alat-alat indera untuk dapat memperoleh data-data yang dapat mendukung penelitian secara nyata. Dalam hal ini, peneliti dalam

melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data bahwa ia sedang melakukan penelitian. Peneliti akan melakukan pengamatan terhadap bagaimana partisipasi masyarakat didalam rancangan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata di DPRD Kabupaten Malang dan bagaimana partisipasi masyarakat didalam proses pembentukannya. Peneliti melakukan observasi dilakukan langsung dilapangan untuk mengetahui bagaimana kondisi dilapangan.

Selain itu observasi yang dilakukan peneliti didukung dengan adanya wawancara dan dokumentasi terhadap pihak DPRD Kabupaten Malang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang, serta masyarakat yang berkaitan langsung dengan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.

Disini peneliti mengamati bagaimana proses sebuah rancangan peraturan daerah tersebut disosialisasikan. Peneliti mengamati

2. Wawancara (*Interview*)

Dalam teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, maka peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. Dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti

perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

Peneliti menentukan informan yang akan diwawancara, sebagai berikut:

1. Bapak Agus Pitono Aji, selaku Kepala Sub Bagian Produk Hukum DPRD Kabupaten Malang.
2. Bapak Sudarto, selaku Staff Sub Bagian Produk Hukum DPRD Kabupaten Malang.
3. Ibu Rahajoeningtias Toeti, selaku Kasi Pengendalian Usaha Jasa Sarana Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang.
4. Bapak Suyanto, selaku petugas pengelola kawasan wisata Candi Singosari.

Pemilihan DPRD Kabupaten Malang sebagai informan dikarenakan DPRD Kabupaten Malang sebagai lembaga legislatif didalam pembentukan sebuah peraturan daerah di Kabupaten Malang. Selanjutnya pemilihan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dikarenakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selaku pihak yang menerima proses sosialisasi rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kepariwisataan tersebut. Pemilihan masyarakat dalam hal ini pengelola kawasan wisata selaku informan dikarenakan pihak masyarakat merupakan tujuan utama dari dibentuknya peraturan daerah tersebut.

3. Dokumentasi

Penelitian ini memerlukan sumber data atau informasi tertulis yang mendukung data-data primer, data-data ini diperoleh dengan studi literatur, arsip-arsip, dokumen-dokumen, foto-foto, laporan-laporan dan catatan yang bersifat mendukung data primer sehingga melengkapi data-data primer tersebut sehingga dapat mempermudah analisis penelitian.

Dokumen utama yang digunakan pada penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.
- d. Dokumen tentang sosialisasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.

F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya

(Sugiyono, 2016:222). Peneliti berperan sebagai alat utama pengumpulan data dan informasi penelitian, peneliti juga sebagai instrumen utama didalam menggunakan instrumen lainnya. Untuk mendukung proses pengumpulan data dalam rangka memperoleh data dan informasi pada penelitian ini, maka peneliti menggunakan beberapa instrumen, antara lain:

1. Peneliti Sendiri

Peneliti sendiri yang melakukan penggalian data yang berhubungan dengan masalah yang ditentukan dan sedang diteliti dan melakukan wawancara langsung dengan kelompok sasaran yang berhubungan dengan fokus penelitian.

2. Pedoman Wawancara

Berupa catatan atau materi yang berhubungan dengan masalah dan fokus penelitian yang telah ditentukan. Sehingga diharapkan peneliti akan memperoleh data dan informasi yang akurat sesuai dengan fokus penelitian.

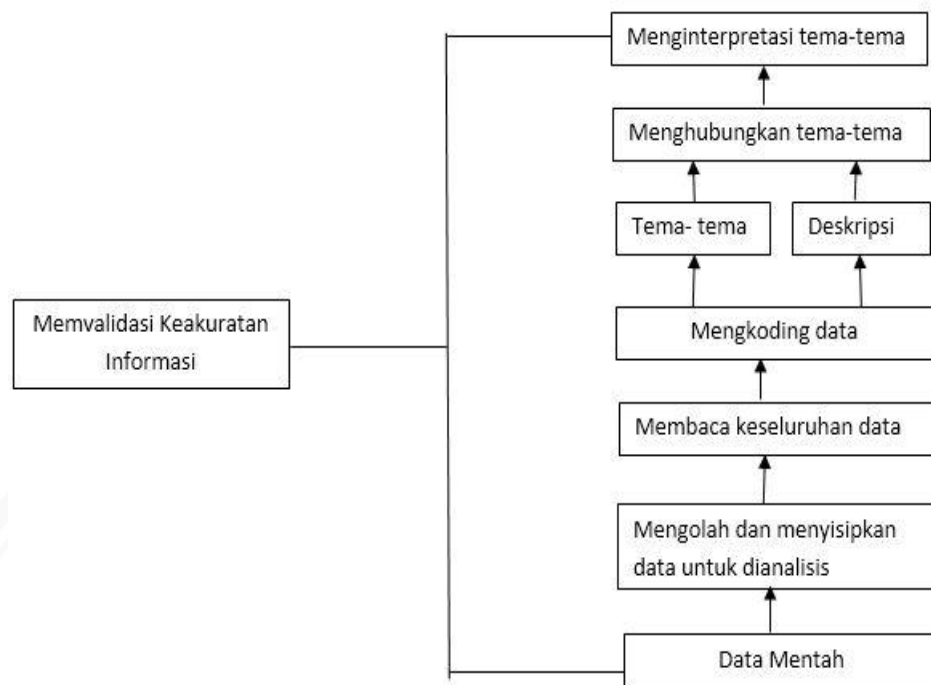
3. Catatan Lapangan

Catatan lapangan ini merupakan catatan penelitian di lapangan untuk mencatat hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan objek yang diperoleh dari hasil pengamatan peneliti dilapangan.

G. Metode Analisis

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Nasution dalam Sugiyono (2016:245) menyatakan “analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang *grounded*.” Namun didalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan linier dan hierarkis yang dibangun dari bawah ke atas dikembangkan oleh Creswell. Berikut ini merupakan gambar mengenai komponen dalam analisis data, yaitu:



Gambar 1. Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif (Creswell, 2016:240)

Menurut Creswell (2016:240) terdapat beberapa langkah dalam menganalisis data sebagaimana berikut ini:

1. Mengolah data dan menginterpretasikan data untuk di analisis.
Langkah ini melibatkan transkrip wawancara, *scanning* materi, mengerti data lapangan atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung sumber informasi.
2. Membaca keseluruhan data. Dalam tahap ini, menulis catatan-catatan khusus atau gagasan-gagasan umum tentang data yang diperoleh.

3. Menganalisis lebih detail dengan mengkode data. Koding merupakan proses mengolah materi atau informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya.
4. Menerapkan proses koding untuk mendeskripsikan *setting*, orang-orang, kategori, dan tema-tema yang akan di analisis.
5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi atau laporan kualitatif.
6. Menginterpretasi atau memaknai data.

Beberapa langkah dalam analisis data kualitatif diatas, akan diterapkan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini data yang didapat ditulis dalam transkrip wawancara, lalu dikoding, dipilah tema-tema sebagai hasil temuan, dan selanjutnya dilakukan interpretasi data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Umum Kabupaten Malang

a. Selayang Pandang

Kabupaten Malang adalah salah satu kabupaten di Indonesia yang terletak di Propinsi Jawa Timur dan merupakan kabupaten yang terluas kedua wilayahnya setelah Kabupaten Banyuwangi dari 38 kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur. Hal ini didukung dengan luas wilayahnya 3.534,86 km² atau sama dengan 353.486 ha dan jumlah penduduknya 2.446.218 jiwa (tahun 2010). Kabupaten Malang mencakup 33 kecamatan serta dikelilingi oleh gunung atau pegunungan Arjuno, Anjasmoro, Kelud, Bromo, Semeru dan Tengger. Kabupaten Malang juga dikenal sebagai daerah yang kaya akan potensi diantaranya dari pertanian, perkebunan, tanaman obat keluarga dan lain sebagainya. Disamping itu Kabupaten Malang juga dikenal dengan obyek-obyek wisatanya.

b. Visi dan Misi

1. Visi Kabupaten Malang adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP, MANTEB, MANETEP”

2. Misi Pembangunan Kabupaten Malang untuk 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

- a. Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan supremasi hukum.
- b. Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis berbasis teknologi informasi.
- c. Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.
- d. Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif.
- e. Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa.
- f. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, pemukiman, dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan.
- g. Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

c. Lambang Kabupaten Malang



Gambar 2: Lambang Kabupaten Malang

Arti dari lambang Kabupaten Malang tersebut adalah:

- Perisai segi lima dengan garis tepi tebal berwarna merah putih menggambarkan jiwa nasional bangsa Indonesia yang suci dan berani, dimana segala usaha ditujukan untuk kepentingan Nasional berlandaskan falsafah Pancasila
- Kubah dengan garis tepi atapnya berwarna kuning emas dan warna dasar hijau menggambarkan papan atau tempat bernaung bagi kehidupan rohani dan jasmani di ruang lingkup daerah Kabupaten Malang yang subur dan makmur
- Bintang bersudut lima berwarna kuning emas mencerminkan Ketuhanan Yang Maha Esa berdasarkan falsafah Pancasila yang luhur dan agung
- Untaian padi berwarna kuning emas, daun kapas berwarna hijau serta bunga kapas berwarna putih mencerminkan tujuan masyarakat adil dan makmur

- Daun kapas berjumlah tujuh belas, bunga kapas berjumlah delapan, gelombang laut berjumlah empat puluh lima mencerminkan semangat perjuangan Proklamasi 17 Agustus 1945
- Rantai berwarna kuning emas mencerminkan Persatuan dan Keadilan
- Gunung berapi berwarna hijau mencerminkan potensi alam daerah Kabupaten Malang, sedangkan asap berwarna putih mencerminkan semangat yang tak pernah kunjung padam
- Laut mencerminkan kekayaan alam yang ada di daerah Kabupaten Malang sedangkan warna biru tua mencerminkan cita-cita abadi dan tak pernah padam
- Keris yang berwarna hitam dan putih mencerminkan jiwa kepahlawanan dan kemegahan sejarah daerah Kabupaten Malang
- Buku terbuka berwarna putih mencerminkan tujuan meningkatkan kecerdasan rakyat untuk kemajuan
- Sesanti Satata Gama Karta Raharja mencerminkan masyarakat adil dan makmur materiil dan spirituail disertai dasar kesucian yang langgeng (abadi)

d. Kondisi Geografis

Kabupaten Malang adalah sebuah kawasan yang terletak pada bagian tengah selatan wilayah Provinsi Jawa Timur. Berbatasan dengan enam kabupaten dan Samudera Indonesia. Sebelah Utara-Timur, berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan dan Probolinggo. Sebelah Timur,

berbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Samudera Indonesia. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Blitar. Sebelah Barat-Utara, berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Mojokerto.

Posisi koordinat Kabupaten Malang terletak antara 112°17',10,90" Bujur Timur dan 112°57',00,00" Bujur Timur dan antara 7°44',55,11" Lintang Selatan dan 8°26',35,45" Lintang Selatan. Dengan luas wilayah sekitar 2.977,005 km², Kabupaten Malang terletak pada urutan luas terbesar kedua setelah Kabupaten Banyuwangi dari 38 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Timur.

e. Wilayah Administratif

Tabel 3: Banyaknya Kelurahan/Desa, RW dan RT menurut Kecamatan di Kabupaten Malang Tahun 2016

NO	Kecamatan	Kelurahan	Desa	RW	RT
1	Donomulyo	-	10	119	502
2	Kalipare	-	9	75	459
3	Pagak	-	8	77	337
4	Bantur	-	10	96	492
5	Gedangan	-	8	84	358
6	Sumbermanjing	-	15	115	539

7	Dampit	1	11	114	711
8	Tirtoyudo	-	13	62	295
9	Ampelgading	-	13	97	316
10	Poncokusumo	-	17	168	825
11	Wajak	-	13	145	486
12	Turen	2	15	172	704
13	Bululawang	-	14	89	351
14	Gondanglegi	-	14	59	382
15	Pagelaran	-	10	63	277
16	Kepanjen	4	14	77	468
17	Sumberpucung	-	7	53	258
18	Kromengan	-	7	51	233
19	Ngajum	-	9	99	354
20	Wonosari	-	8	78	308
21	Wagir	-	12	96	387
22	Pakisaji	-	12	87	373
23	Tajinan	-	12	75	360

24	Tumpang	-	15	104	646
25	Pakis	-	15	147	831
26	Jabung	-	15	82	476
27	Lawang	2	10	151	631
28	Singosari	3	14	138	789
29	Karangploso	-	9	109	494
30	Dau	-	10	79	338
31	Pujon	-	10	82	349
32	Ngantang	-	13	73	348
33	Kasembon	-	6	67	192
Jumlah		12	378	3183	14.869

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang.

2. Gambaran Umum DPRD Kabupaten Malang

a. Selayang Pandang

Berdasarkan hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014 komposisi kursi Partai Politik yang memiliki wakil di Gedung DPRD masa jabatan keanggotaan 2014-2019 adalah sebagai berikut:

NO.	PARTAI POLITIK	JUMLAH
-----	----------------	--------

		KURSI
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	13
2.	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	12
3.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	8
4.	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	7
5.	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	4
6.	Partai DEMOKRAT	3
7.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	2
8.	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	1
JUMLAH		50

Tabel 4: Daftar Keanggotaan DPRD Kabupaten Malang Periode 2014-2019

Sumber: DPRD Kabupaten Malang

b. Visi dan Misi

Visi dari DPRD Kabupaten Malang adalah:

“Mewujudkan DPRD yang kredibel, kapabel, dan akseptabel yang menjunjung tinggi nilai demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan rakyat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta meningkatkan peran dan fungsi dewan dalam legislatif, anggaran, dan pengawasan.”

Sedangkan Misi dari DPRD Kabupaten Malang adalah:

1. Meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja lembaga DPRD dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.
2. Menjunjung tinggi moralitas agama dalam kapasitas sebagai anggota DPRD.
3. Berpihak kepada kepentingan rakyat/masyarakat diatas kepentingan pribadi dan golongan.
4. Meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme anggota DPRD sebagai penyalur aspirasi masyarakat.
5. Menciptakan hubungan yang harmonis antara lembaga Legislatif dan Eksekutif.
6. Menjadikan Lembaga Dewan sebagai arena ruang publik yang bebas dan bertanggung jawab sehingga masyarakat dapat menyampaikan/menyalurkan aspirasi nya.
7. Mendorong terwujudnya hubungan yang strategis antara pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik.
8. Mendorong terwujudnya lembaga legislatif yang bersih dan berwibawa dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi lembaga DPRD.

c. Komisi DPRD Kabupaten Malang

1. Komisi I

Membidangi masalah Pemerintahan, Hukum, dan Perundang-undangan

2. Komisi II

Membidangi masalah Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

3. Komisi III

Membidangi masalah Keuangan

4. Komisi IV

Membidangi masalah Pembangunan

d. Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Malang

1. Badan Musyawarah

2. Badan Anggaran

3. Badan Pembentukan Peraturan Daerah

4. Badan Kehormatan

e. Fraksi DPRD Kabupaten Malang

1. PDI Perjuangan

2. Partai Golongan Karya

3. Partai Kebangkitan Bangsa

4. Partai Gerindra

5. Nasional Demokrat (Nasdem)

6. Demokrat – Hanura

3. Gambaran Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Malang

a. Visi dan Misi

Visi dari Sekretariat DPRD Kabupaten Malang adalah “Terwujudnya

Pelayanan Administratif kepada DPRD Kabupaten Malang Melalui

Pelayanan yang Profesional”.

Sedangkan Misi dari Sekretariat DPRD Kabupaten Malang adalah “Mengoptimalkan Pelayanan Administratif dan Teknis kepada DPRD Kabupaten Malang Melalui Peningkatan Kualitas Aparatur SDM dan Ketersediaan Sarana Prasarana”.

b. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

- a. Meningkatkan Pelayanan Administratif dan Teknis kepada DPRD Kabupaten Malang
- b. Mewujudkan, Mengembangkan SDM Aparatur dan Sistem Administrasi Internal Sekretariat DPRD Kabupaten Malang Secara Menyeluruh
- c. Meningkatkan Ketersediaan Prasarana dan Sarana Penunjang Kerja
- d. Mengoptimalkan Koordinasi Antar Lembaga di Kabupaten Malang

2. Sasaran

- a. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi kepada DPRD Kabupaten Malang
- b. Terwujudnya Peningkatan Kualitas SDM Aparatur dan Sistem Administrasi Internal Sekretariat DPRD Kabupaten Malang
- c. Meningkatnya Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Kerja

c. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja

Sekretariat DPRD, Sekretariat DPRD Kabupaten Malang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, penyelenggaraan kegiatan baik DPRD dan Sekretariat DPRD, serta penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, yang dijabarkan seperti dibawah ini:

1. Sekretaris DPRD

- a. Memimpin Sekretariat DPRD dalam perumusan perencanaan, kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi DPRD dan Sekretariat DPRD
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya

2. Bagian Umum

- a. Tugas

1. Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi penatausahaan surat menyurat, penggandaan dan kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, keprotokolan dan publikasi.
2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan bidang tugasnya.

- b. Fungsi

1. Perencanaan kegiatan bagian umum

2. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan pegawai
 3. Penyelenggaraan kegiatan penatausahaan surat menyurat, pengadaan dan kearsipan
 4. Pengelolaan administrasi perlengkapan dan kekayaan daerah
 5. Pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor
 6. Pengelolaan pengadaan barang dan jasa
 7. Pengelolaan urusan keprotokolan dan hubungan masyarakat, DPRD dan Sekretariat DPRD
 8. Pengelolaan penerimaan aspirasi masyarakat
 9. Pelaksanaan publikasi kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD
3. Bagian Keuangan
- a. Tugas
 1. Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD dalam menyusun rencana kerja dan rencana anggaran, mengelola anggaran serta menyusun rencana laporan kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD
 2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan bidang tugasnya
 - b. Fungsi
 1. Perencanaan kegiatan bagian keuangan

2. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja DPRD dan Sekretariat DPRD
 3. Pelaksanaan penyusunan rencanan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD
 4. Penyiapan dokumen pengajuan dan pembayaran anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD
 5. Pelaksanaan verifikasi dan pembukuan DPRD dan Sekretariat DPRD
 6. Penyusunan laporan kinerja
4. Bagian Persidangan
- a. Tugas
 1. Menyelenggarakan fasilitas rapat dan persidangan DPRD, menyiapkan alat kelengkapan, reses, peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD serta penyediaan tim dan tenaga ahli DPRD dan fraksi-fraksi DPRD
 2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan bidang tugasnya
 - b. Fungsi
 1. Perencanaan kegiatan bagian persidangan
 2. Penyiapan jadwal kegiatan rapat dan persidangan dan kunjungan DPRD
 3. Pelaksanaan penyusunan notulensi dan/atau risalah rapat persidangan DPRD

4. Pelaksanaan koordinasi kegiatan alat kelengkapan
5. Pelaksanaan orientasi dan pendalaman bidang tugas DPRD
6. Pelaksanaan administrasi tenaga ahli DPRD dan fraksi-fraksi
DPRD

5. Bagian Perundang-Undangan

a. Tugas

1. Menyiapkan bahan penyusunan produk hukum daerah dan produk hukum DPRD, pengelolaan data penyusunan produk hukum daerah dan produk hukum DPRD, melaksanakan dokumentasi produk hukum, menyiapkan dan melaksanakan pengkajian perundang-undangan, pengelolaan data DPRD serta pengelolaan perpustakaan
2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan bidang tugasnya

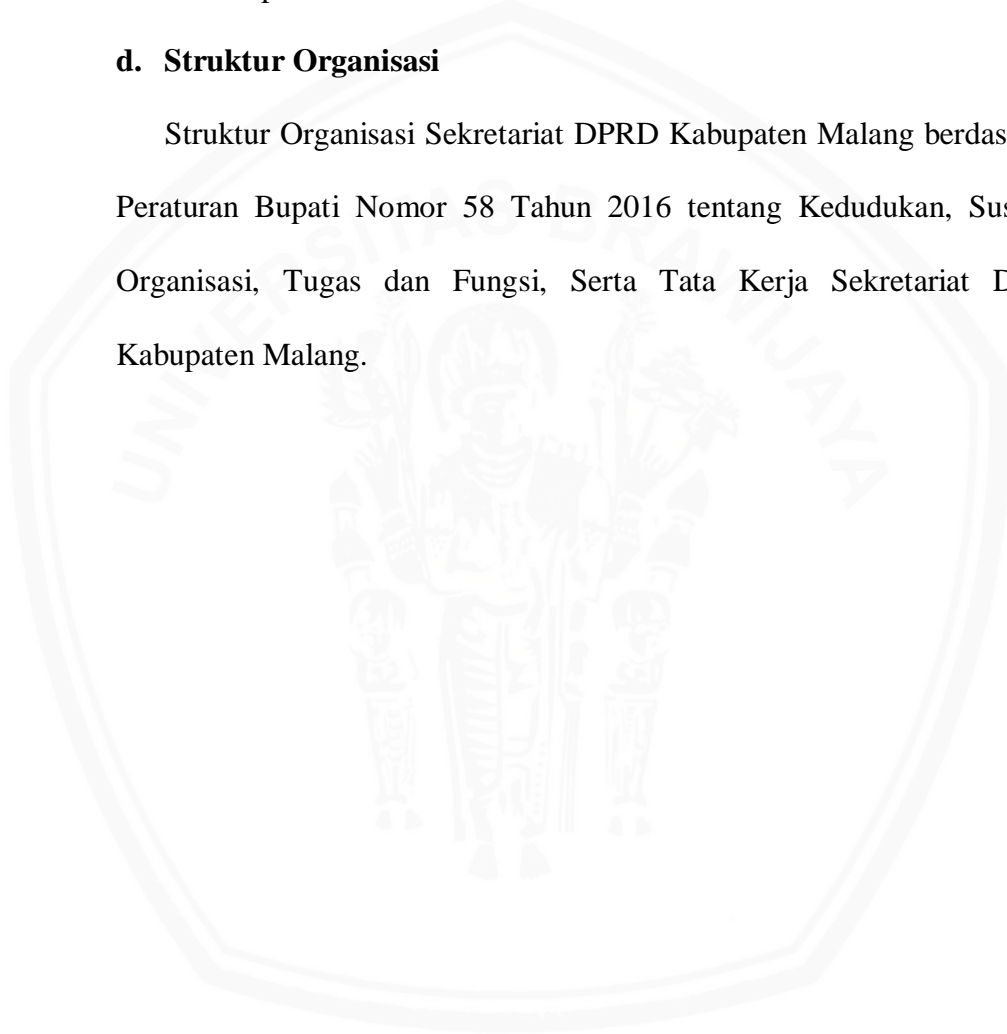
b. Fungsi

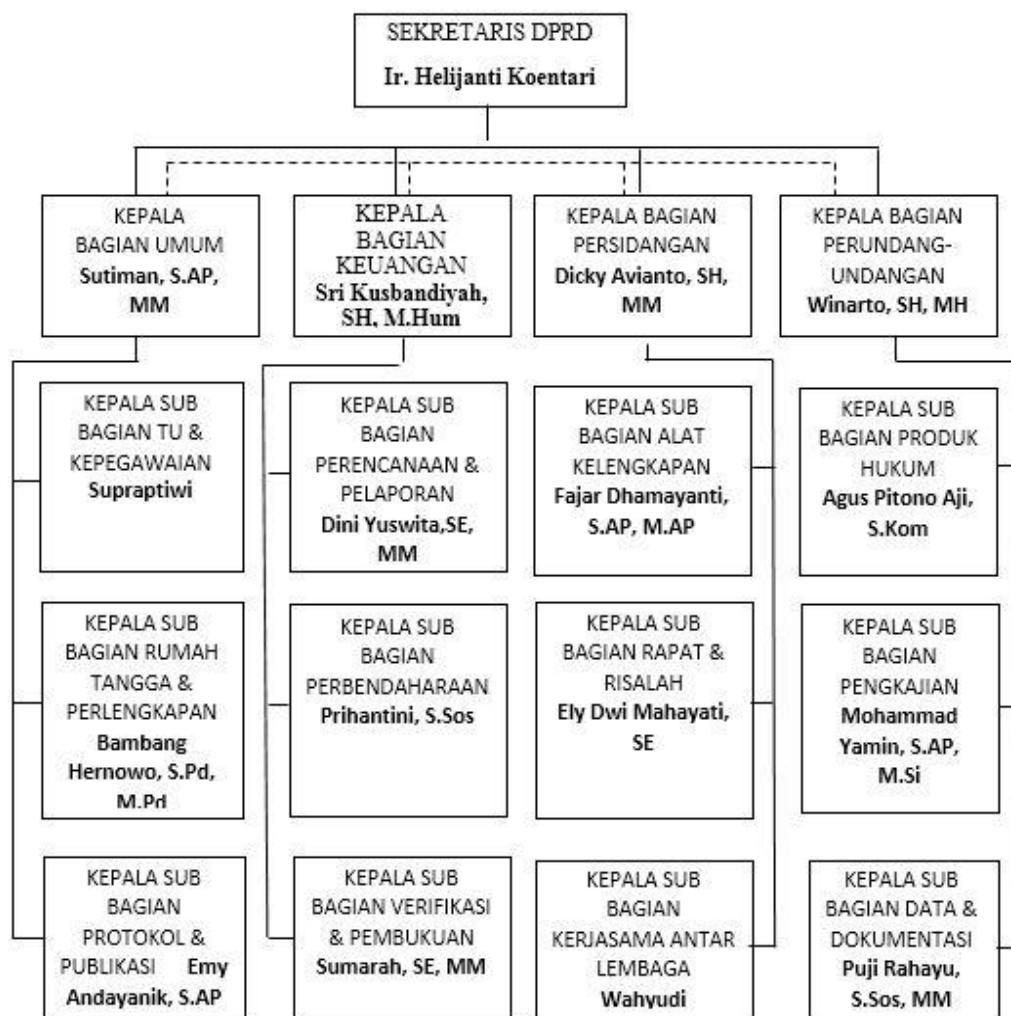
1. Perencanaan bagian perundang-undangan
2. Pelaksanaan pengumpulan bahan pengambilan kebijakan dan rekomendasi serta kerjasama antara DPRD dan Sekretariat DPRD dengan instansi lain
3. Pelaksanaan usulan pengangkatan dan pemberhentian pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

4. Pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan produk hukum daerah dan produk hukum DPRD
5. Penyimpanan produk hukum daerah dan produk hukum DPRD
6. Pelaksanaan koordinasi penyusunan produk hukum daerah dan produk hukum DPRD

d. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Malang.





Keterangan : ————— GARIS KOMANDO
 - - - - - GARIS KOORDINASI

Gambar 3: Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Malang

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Malang

4. Gambaran Umum Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kabupaten Malang

a. Sejarah

Pada tahun 1989 sampai dengan tahun 1996 pada saat itu masih berstatus Cabang Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur yang berkantor di

Jalan Kawi No.41 Malang. Pada tahun 1996 sampai dengan 2004 terjadi perubahan menjadi Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Malang dengan alamat kantor di Jalan Gede No. 6, Malang. Pada tahun 2004 sampai 2008 terjadi perubahan lagi berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 90 Tahun 2004 menjadi Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Malang dengan alamat kantor Jalan KH. Agus Salim No.7, Malang. Sedangkan pada tahun 2008 sampai tahun 2013 terjadi perubahan lagi sesuai dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 11 Tahun 2008 menjadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang yang berkantor di Jalan Raya Singosari No. 275, Malang.

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan peraturan Bupati Malang Nomor 111 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari susunan organisasi dan tugas pokok fungsinya sebagai berikut:

1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantu
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas:

- a. Pengumpulan pengelolaan dan pengendalian data yang dibentuk database serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan
- b. Perencanaan strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- c. Perumusan kebijakan teknis bidang Kebudayaan dan Pariwisata
- d. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Kebudayaan dan Pariwisata
- f. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang Kebudayaan dan Pariwisata
- g. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata
- h. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- i. Pembinaan UPTD
- j. Pengkoordinasian, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- k. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan bidang seni budaya dan pariwisata
- l. Pembinaan kepada masyarakat tentang kebudayaan dan pariwisata

- m. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga lainnya
 - n. Peningkatan pengembangan apresiasi seni budaya
 - o. Pembinaan pengembangan obyek wisata, pentas seni budaya, rekreasi, dan aneka hiburan
3. Kepala Dinas mempunyai tugas:
- a. Memimpin Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam perumusan atau perencanaan kebijakan, pelaksanaan teknis pembangunan dan pemeliharaan fasilitas kebudayaan dan pariwisata serta menyelenggarakan perijinan, pembinaan, koordinasi, pengawasan, dan pengendalian teknis operasional di bidang kebudayaan dan pariwisata
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Dalam menjalankan fungsinya Sekretaris mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi, dan pelaporan program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, pengelola urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan rumah tangga, hubungan masyarakat, urusan keuangan
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk melaksanakan tugasnya Sekretaris mempunyai tugas:

1. Perencanaan kegiatan kesekretariatan
2. Pengelola urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan, dan pendidikan pelatihan pegawai
3. Pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan, dan hubungan masyarakat
4. Penyelenggara pengelola administrasi keuangan dan kekayaan daerah
5. Penyelenggaraan kegiatan surat-menyurat, pengetikan, pengadaan, kearsipan
6. Pengelolaan administrasi perlengkapan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan, dan penyusunan rencana pembangunan, evaluasi, dan pelaporan
7. Pengkoordinasian Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

c. Visi dan Misi

1. Visi

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata dan salah satu pelaku pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata daerah merumuskan visi sebagai berikut “Terwujudnya Kepariwisata Kabupaten Malang yang Berbasis Masyarakat”

2. Misi

Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut guna memberikan arah dan tujuan ingin dicapai, maka ditetapkan misi sebagai berikut:

- a. Membangun jati diri dan citra kepariwisataan Kabupaten Malang yang berbasis masyarakat
- b. Mendorong perkembangan kepariwisataan Kabupaten Malang yang berkualitas dan memiliki daya saing melalui:
 1. Pengembangan obyek dan daya tarik wisata berdasarkan kearifan lokal
 2. Membangun sarana dan prasarana dalam keselarasan dan keharmonisan lingkungan
 3. Mewujudkan kualitas pelayanan yang baik pada masyarakat
 4. Mengoptimalkan sarana informasi dan menyelenggarakan promosi lebih berkualitas
 5. Meningkatkan peran serta masyarakat

d. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Berdasarkan Visi Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2011-2015 maka diterapkan tujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya dukungan untuk mewujudkan citra kepariwisataan Kabupaten Malang yang berbasis masyarakat

- b. Meningkatkan pemahaman masyarakat atas nilai-nilai budaya daerah
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dan dukungan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan kekayaan budaya dan pengelolaan keragaman budaya
- d. Meningkatkan pengembangan destinasi wisata melalui pengembangan aksesibilitas, produk wisata, kelompok sadar wisata dan pembentukan desa wisata
- e. Meningkatkan jumlah masyarakat Kabupaten Malang yang melek/paham pariwisata melalui promosi dan informasi yang berkualitas
- f. Meningkatkan pembinaan usaha sarana pariwisata dan usaha jasa pariwisata

2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

a. Tujuan

1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan
2. Meningkatnya pengembangan kualitas dan kuantitas destinasi wisata
3. Meningkatnya kualitas dan efektivitas promosi pariwisata daerah

b. Sasaran

1. Terlaksananya pemberdayaan seniman, kelompok kesenian, budayawan lokal Kabupaten Malang

2. Meningkatnya pengembangan obyek wisata secara kualitas dan kuantitas
3. Terlaksananya peningkatan program kunjungan wisatawan di Kabupaten Malang

B. Penyajian Data dan Fokus Penelitian

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil temuan-temuan di lapangan terutama di DPRD Kabupaten Malang, Dinas Pariwisata Kabupaten Malang, dan masyarakat di sekitar destinasi wisata Kabupaten Malang. Hasil temuannya adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat dalam Rancangan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.

a. Proses Pembentukan Peraturan Daerah

Peraturan daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. Didalam pembentukannya, Undang-Undang digunakan sebagai instrumen yuridis didalam penyelenggaraan pemerintah untuk menetapkan atau membentuk suatu peraturan daerah.

Keberadaan peraturan daerah merupakan sebuah hal yang harus dimiliki oleh suatu pemerintahan daerah didalam proses pelaksanaan suatu pemerintahan daerah. Peraturan daerah harus dijadikan acuan bagi

pemerintah daerah didalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan di daerah otonomi nya masing-masing.

Suatu proses dari sebuah pembentukan peraturan daerah tidak lepas dari partisipasi masyarakat didalamnya. Partisipasi masyarakat menjadi sebuah bagian penting dalam sebuah pembentukan peraturan daerah karena masyarakat merupakan pihak yang paling mengerti bagaimana kondisi sebenarnya di lapangan. Masyarakat bisa menyalurkan partisipasinya baik secara individu maupun secara berkelompok melalui lembaga legislatif di daerah yaitu DPRD atau SKPD yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

Pembentukan sebuah peraturan daerah sendiri harus melalui beberapa proses seperti tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan atau pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Selanjutnya tahap-tahap pembentukan peraturan daerah dijelaskan seperti berikut:

Tahap pertama didalam pembentukan peraturan daerah menurut Bapak Agus Pitono selaku Kepala Sub Bagian Produk Hukum adalah tahap perencanaan. Beliau menjelaskan tahap perencanaan adalah sebagai berikut:

“Jadi awal sebuah peraturan daerah itu dibentuk kan pasti ada usulan ya mas. Nah, usulan dari sebuah peraturan daerah itu bisa diinisiasi dari pihak DPRD maupun pihak Kepala Daerah mas. Setelah sebuah rancangan peraturan daerah diusulkan, selanjutnya rancangan peraturan daerah tersebut dimasukkan kedalam sebuah program legislasi daerah atau yang biasa disebut dengan

PROLEGDA. Didalam PROLEGDA tersebut rancangan peraturan daerah tersebut ditentukan hal-hal apa saja yang dibutuhkan.” (Agus Pitono, Kepala Sub Bagian Produk Hukum DPRD Kabupaten Malang, 21 Juni 2018)

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pada tahap awal pembentukan peraturan daerah adalah tahap perencanaan. Didalam tahap perencanaan tersebut rancangan peraturan dapat diinisiasi oleh pihak DPRD maupun kepala daerah. Rancangan peraturan daerah yang akan dibahas selanjutnya dimasukkan kedalam program legislasi daerah atau PROLEGDA.

Tahap selanjutnya menurut Bapak Agus Pitono adalah tahap penyusunan. Beliau menjelaskan tahap penyusunan adalah sebagai berikut:

“Tahap selanjutnya setelah rancangan peraturan daerah itu masuk ke PROLEGDA, rancangan peraturan daerah tersebut selanjutnya disusun rancangannya. Setelah rancangan selesai, nanti dikoordinasikan kepada pihak-pihak yang terkait langsung dengan rancangan peraturan daerah tersebut. Setelah penyusunan rancangan selesai, selanjutnya dibuatkan naskah akademiknya sebagai acuan dari aspek teoritis rancangan peraturan daerah tersebut.” (Agus Pitono, Kepala Sub Bagian Produk Hukum DPRD Kabupaten Malang, 21 Juni 2018)

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa rancangan peraturan daerah yang dibuat harus disertai dengan penjelasan dan/atau naskah akademik. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan Undang-Undang. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah

selanjutnya dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.

Tahap selanjutnya menurut bapak Agus Pitono adalah tahap pembahasan. Tahap pembahasan menurut beliau adalah sebagai berikut:

“Setelah tahap penyusunan selesai, selanjutnya rancangan peraturan daerah tersebut masuk kedalam tahap pembahasan. Didalam tahap pembahasan ini, rancangan peraturan daerah tersebut dimasukkan kedalam rapat-rapat yang kita selenggarakan. Rapat tersebut selain dari kita sendiri selaku pihak legislasi, juga mengundang pihak-pihak yang terkait lain diluar DPRD untuk mengikuti proses pembahasan.” (Agus Pitono, Kepala Sub Bagian Produk Hukum DPRD Kabupaten Malang, 21 Juni 2018)

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa tahap selanjutnya didalam pembentukan peraturan daerah adalah tahap pembahasan. Didalam proses pembahasan tersebut, pihak DPRD juga mengundang pihak-pihak terkait untuk ikut didalam proses pembahasan tersebut. Pembahasan bersama tersebut dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan, yang dilakukan dalam rapat komisi, panitia, alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi, dan paripurna. Selanjutnya rancangan peraturan tersebut dibahas bersama dengan instansi terkait baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, ataupun Pemerintah Daerah.

Setelah pembahasan selesai, tahap selanjutnya menurut Bapak Agus Pitono adalah tahap pengesahan atau penetapan peraturan daerah. Menurut beliau, tahap pengesahan adalah sebagai berikut:

“Setelah pembahasan tadi selesai ya mas, itu selanjutnya rancangan peraturan daerah yang sudah disetujui selanjutnya disahkan.

Pengesahan ini ditandai dengan pemberian nomor di peraturan daerah tersebut dan diberi tanda tangan dari DPRD dan kepala daerah pada saat rapat paripurna terakhir. Hal itu berarti peraturan daerah tersebut sudah siap diundangkan.” (Agus Pitono, Kepala Sub Bagian Produk Hukum DPRD Kabupaten Malang, 21 Juni 2018)

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Rancangan peraturan daerah tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menjadi peraturan daerah dengan membubuhkan tanda tangan didalam rancangan peraturan daerah tersebut.

Tahap terakhir didalam proses pembentukan peraturan daerah menurut penjelasan Bapak Agus Pitono adalah tahap pengundangan. Didalam tahap ini peraturan daerah yang sudah disahkan selanjutnya diberlakukan atau disebarluaskan sebagai payung hukum didalam pelaksanaan suatu kebijakan. Tahap pengundangan menurut Bapak Agus Pitono adalah sebagai berikut:

“Setelah semuanya selesai, yang terakhir itu pengundangan mas. Pengundangan itu peraturan daerah yang sudah disahkan itu selanjutnya diterapkan buat payung hukum didalam pelaksanaan kebijakan mas. Peraturan yang sudah disahkan selanjutnya dibagikan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terkait untuk dilaksanakan.” (Agus Pitono, Kepala Sub Bagian Produk Hukum DPRD Kabupaten Malang, 21 Juni 2018)

Untuk pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10

Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata sendiri juga melalui beberapa tahapan didalam proses pembentukannya.

Bapak Sudarto selaku Staf Sub Bagian Produk Hukum, menjelaskan bagaimana proses pembentukan dari Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata sebagai berikut:

“Jadi ada beberapa proses mas dari pembentukan sebuah peraturan daerah itu mas. Sebuah peraturan daerah itu bisa diusulkan oleh beberapa pihak seperti dari pihak pemerintah kabupaten, DPRD ada fraksi sama komisi. Lalu bisa juga dari masyarakat itu mengusulkan mas melalui mekanisme yang sudah ada. Dari usulan-usulan tersebut nanti kita buat surat untuk selanjutnya masuk kedalam program legislasi daerah atau disebut PROLEGDA. Lalu setelah masuk ke program legislasi daerah, selanjutnya dibuatkan rekomendasi untuk selanjutnya dikaji dan diusulkan untuk dibuat sebuah naskah akademik tentang rancangan peraturan daerah tersebut. Usulan peraturan daerah tersebut selanjutnya diparipurnakan untuk mendapat persetujuan dari pihak dewan. Setelah semua setuju, selanjutnya dibuatkan tim panitia khusus atau pansus untuk membentuk peraturan daerah tersebut. Tugas pansus tersebut adalah membahas rancangan peraturan daerah tersebut dengan tim raperda dari pemerintah Kabupaten Malang. Selanjutnya rancangan peraturan daerah tersebut dikonsultasikan dengan beberapa pihak seperti pihak pemerintah pusat, provinsi. Setelah konsultasi selesai, selanjutnya dilakukan uji publik. Setelah uji publik selesai, selanjutnya adalah melakukan fasilitasi ke biro hukum yang ada di provinsi untuk mendapatkan revisi dari gubernur terkait dengan pasal-pasal yang tidak sesuai. Revisi dari pihak pemerintah provinsi tersebut selanjutnya dibahas oleh tim pansus dan tim raperda dari pihak Kabupaten Malang. Jika sudah selesai, rancangan peraturan daerah tersebut mendapatkan nomor untuk selanjutnya disahkan.” (Sudarto, Staff Sub Bagian Produk Hukum DPRD Kabupaten Malang, 21 Juni 2018)

Penjelasan tersebut ditambahkan oleh Bapak Agus Pitono selaku Kepala Sub Bagian Produk Hukum DPRD Kabupaten Malang sebagai berikut:

“Untuk Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2013 sendiri pembentukannya sudah seperti yang pak Darto tadi sebutkan tadi mas. Untuk pembentukannya juga harus melalui beberapa tahap yang sudah disebutkan tadi. Tapi kalau untuk peraturan daerah yang mas sebutkan tadi, ada yang tidak disebutkan oleh pak Darto, yaitu

kalau dari kita ada studi banding ke daerah tempat wisata seperti peraturan daerah ini kan tentang pariwisata. Kita dulu kalau tidak salah studi bandingnya ke Bali mas. Kita studi banding untuk melihat bagaimana peraturan daerah di Bali didalam mengelola pariwisatanya mas.”

(Agus Pitono, Kepala Sub Bagian Produk Hukum DPRD Kabupaten Malang, 21 Juni 2018)

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata sudah mengikuti aturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Tahapan-tahapan didalam proses pembentukan peraturan daerah sudah dilakukan didalam pembentukan peraturan daerah tersebut.

b. Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah

Masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi didalam proses pembentukan sebuah peraturan daerah. Sehingga pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi didalam proses pembentukan peraturan daerah. Bapak Sudarto selaku Staf Sub Bagian Produk Hukum DPRD Kabupaten menjelaskan bagaimana masyarakat bisa berpartisipasi didalam proses pembentukan peraturan daerah tersebut:

“Untuk masyarakat sendiri bisa berpartisipasi didalam proses ketika rancangan peraturan daerah tersebut dilakukan uji publik. Didalam uji publik tersebut kita menyerap aspirasi atau pendapat dari pihak-pihak terkait. Kita juga meminta kritik, saran, dan masukan untuk penyempurnaan rancangan peraturan daerah tersebut. Karena peraturan daerah ini dibentuk kan untuk kesejahteraan masyarakat, jadi kita ingin

sekali mendapatkan masukan dari mereka.” (Sudarto, Staff Sub Bagian Produk Hukum DPRD Kabupaten Malang, 21 Juni 2018)

Selanjutnya Bapak Agus Pitono selaku Kepala Sub Bagian Produk Hukum, memberikan penjelasan bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi didalam proses pembentukan peraturan daerah:

“Dalam proses pembentukan sebuah peraturan daerah, terdapat tiga proses yang harus dilakukan, antara lain proses perencanaan, pembahasan, dan penetapan. Masyarakat bisa berpartisipasi didalam proses perencanaannya itu. Didalam proses perencanaan, terdapat sebuah tahap yang dinamakan tahap sosialisasi. Nah, di tahap sosialisasi inilah masyarakat bisa berpartisipasi. Jadi tidak di semua proses masyarakat bisa ikut berpartisipasi. (Agus Pitono, Kepala Sub Bagian Produk Hukum DPRD Kabupaten Malang, 21 Juni 2018)

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan daerah ketika pembentukan peraturan daerah memasuki tahap uji publik/sosialisasi. Tujuan dari tahap uji publik atau sosialisasi tersebut adalah untuk menyerap aspirasi masyarakat dan memperoleh masukan, kritik, ataupun saran dari masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut juga bisa diketahui bahwa masyarakat tidak bisa terlibat didalam setiap tahapan didalam proses pembentukan sebuah peraturan daerah.



Gambar 4. Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata
Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Malang

Sedangkan untuk pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, bapak Agus Pitono selaku Kepala Sub Bagian Produk Hukum menjelaskan terkait pihak-pihak yang diundang didalam pembentukan peraturan daerah tersebut sebagai berikut:

“Untuk pembentukan peraturan daerah tersebut, masyarakat berpartisipasi sama seperti yang saya sebutkan tadi ya mas, di proses sosialisasinya. Karena peraturan daerah ini terkait dengan pariwisata, maka didalam tahap sosialisasi ini kami selaku pihak DPRD mengundang beberapa SKPD yang terkait untuk memberikan masukan terhadap rancangan peraturan daerah yang sudah dibuat. Untuk peraturan daerah tentang penyelenggaraan kepariwisataan ini sendiri kami mengundang pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Camat dari setiap Kecamatan, dan SKPD terkait lainnya. Kita juga mengundang dari pihak swasta yang memiliki berkaitan untuk

mengelola pariwisata.” (Agus Pitono, Kepala Sub Bagian Produk Hukum DPRD Kabupaten Malang, 21 Juni 2018)

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat dapat berpartisipasi didalam proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan ketika rancangan peraturan daerah tersebut disosialisasikan. Pada saat proses sosialisasi tersebut dilaksanakan, pihak DPRD mengundang beberapa pihak yang berkaitan dengan peraturan daerah tersebut, seperti pihak Dinas Pariwisata, perwakilan dari setiap kecamatan, dan SKPD terkait lainnya.

Bapak Sudarto selaku Staf Sub Bagian Produk Hukum DPRD Kabupaten Malang menambahkan penjelasan terkait dengan pihak-pihak yang diundang didalam proses sosialisasi pembentukan peraturan daerah tersebut. Untuk aktor-aktor yang terlibat didalam proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan adalah sebagai berikut:

“Untuk pihak-pihak yang terlibat dalam hal ini peraturan daerah tentang penyelenggaraan kepariwisataan yang saya ingat antara lain kita mengundang pihak Dinas Pariwisata, Dinas Pendapatan, Dinas Perizinan, dan dinas-dinas lain yang terkait. Kita juga mengundang dari pihak Camat dan asosiasi-asosiasi yang mengelola pariwisata.” (Sudarto, Staf Sub Bagian Produk Hukum DPRD Kabupaten Malang, 21 Juni 2018)

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pihak-pihak atau aktor-aktor yang terlibat didalam proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan

Kepariwisataan terdiri dari pihak dari pemerintah dalam hal ini SKPD yang berkaitan dan pihak swasta. Dari pihak SKPD sendiri terdapat Dinas Pariwisata, Dinas Pendapatan, Dinas Perizinan, dan juga Camat dari tiap Kecamatan di Kabupaten Malang. Sedangkan dari pihak swasta sendiri terdapat asosiasi yang ikut didalam mengelola pariwisata Kabupaten Malang.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

Jalan Panji Nomor 119 Telp. (0341) 398400, Fax. (0341) 398402
e-mail : dprd@malangkab.go.id website : <http://dprd.malangkab.go.id>
KEPANJEN (65163)

DAFTAR HADIR

Hari/ Tanggal : Rabu / 14 Juni 2013
Pukul : 10.00 / Selesai
Acara : Sosialisasi Raport penyelenggaraan Kepariwisataan
Tempat : Hotel Antarkasa

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.			1
2.			2
3.	RATNA	DPRD	3
4.			4
5.	Eudang Purwaningsih	Kasubag Kew. Disbudpar	5
6.	Heriogi D	Kelid. Perencanaan	6
7.	Saipe Ghosi	Beg. Hukum	7
8.	Indra Jungsul	Ins. Juru	8
9.	Endang Sulistyawati	Kasi. Perencanaan	9
10.	Julianto	Set. Pol. PPR LIDMAS	10
11.			11
12.			12
13.			13
14.			14
15.			15

Ketua,

Gambar 5. Pihak yang Diundang Ketika Proses Sosialisasi Berlangsung

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Malang

Didalam proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ditunjuk sebagai pelaksana teknis sosialisasi

rancangan peraturan daerah tersebut kepada masyarakat. Bu Rahajoeningtias Toeti selaku Kasi Pengendalian Usaha Jasa Sarana Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang, partisipasi masyarakat didalam pembentukan peraturan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

“Jadi gini mas, didalam proses pembentukan peraturan daerah yang mas sebutkan tadi, dari DPRD sendiri memberikan semacam rancangan peraturan daerah yang akan dibuat. Nah, dari rancangan peraturan daerah tersebut nanti pihak dari DPRD megundang kita Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan beberapa pihak yang terkait dengan peraturan daerah tersebut. Lalu didalam rapat itu rancangan peraturan daerah di *floor* kan ke kita untuk mendapatkan masukan. Setelah proses sosialisasi tersebut selesai, kita Pihak Dinas Pariwisata mengadakan rapat sendiri atau biasa kita sebut dengan rapat internal dengan pihak SKPD lain. Rapat tersebut nanti menghasilkan beberapa masukan untuk selanjutnya kita serahkan kepada pihak DPRD untuk menjadi koreksi mereka terhadap rancangan peraturan daerah tersebut. Jadi setelah kita rapat internal dengan SKPD itu kita akan ada rapat lagi dengan pihak DPRD. Nah, pada saat rapat dengan DPRD itu kita menyampaikan masukan-masukan hasil dari rapat internal kita dengan beberapa SKPD tersebut.” (Rahajoeningtias Toeti, Kasi Pengendalian Usaha Jasa Sarana Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Malang, 20 Juli 2018)

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa rancangan peraturan daerah yang telah dibuat oleh DPRD disosialisasikan kepada pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta SKPD yang terkait untuk mendapatkan masukan-masukan yang digunakan untuk menyempurnakan peraturan daerah tersebut. Sebelum memberikan masukan kepada pihak DPRD, pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengadakan rapat internal dengan SKPD terkait untuk membahas rancangan peraturan daerah tersebut. Rapat internal tersebut bertujuan untuk menghasilkan koreksi ataupun masukan untuk menyempurnakan rancangan peraturan daerah

tersebut. Setelah masukan atau koreksi tersebut disetujui bersama, selanjutnya hasil dari rapat internal tersebut diserahkan kepada pihak DPRD untuk ditindaklanjuti.

Bu Rahajoeningtias Toeti menambahkan penjelasannya mengenai bagaimana masyarakat bisa berpartisipasi atau memberikan masukannya didalam proses pembentukan peraturan daerah tersebut:

“Untuk masyarakat sendiri bisa memberikan masukannya pada saat kita dari Dinas Pariwisata memberikan sosialisasi tentang rancangan peraturan daerah tersebut. Sosialisasi tersebut kita lakukan dengan dua cara mas. Yang pertama dengan mengumpulkan beberapa pihak masyarakat. Beberapa pihak dari masyarakat tersebut kita undang untuk datang ke Dinas Pariwisata untuk diberikan penjelasan mengenai rancangan peraturan daerah tersebut. Salah satu contohnya itu kan di salah satu poin rancangan peraturan daerah itu kan ada yang mengatur tentang ijin usaha ya mas. Nah, kita mengumpulkan beberapa pelaku usaha yang ada untuk diberikan pengertian tentang peraturan daerah tersebut. Kita berikan penjelasan supaya nanti usaha yang mereka miliki tidak terkena tindak pidana karena tidak memiliki izin. Cara yang kedua mas, kita melakukan sosialisasi peraturan daerah tersebut dengan cara “*door to door*” atau “pintu ke pintu”. Maksudnya dengan “*door to door*” ini kita terjun ke lapangan langsung untuk memberikan penjelasan mengenai rancangan peraturan daerah tersebut. Kita dari Dinas Pariwisata mendatangi langsung ke beberapa lokasi wisata untuk memberikan penjelasan mengenai rancangan peraturan daerah tersebut.” (Rahajoeningtias Toeti, Kasi Pengendalian Usaha Jasa Sarana Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang, 20 Juli 2018).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa masyarakat dapat memberikan partisipasi atau masukannya ketika pihak dari Dinas Pariwisata memberikan sosialisasi tentang rancangan peraturan daerah tersebut. Proses sosialisasi peraturan daerah tersebut dilakukan dengan dua cara yaitu dengan mengundang pihak-pihak yang terkait untuk melakukan

diskusi dan dengan cara *door to door* yaitu mendatangi masyarakat untuk memberikan sosialisasi terkait peraturan daerah tersebut.



Gambar 6. Proses Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Didalam proses sosialisasi tersebut Bu Rahajoeningtias Toeti selaku Kasi Pengendalian Usaha Jasa Sarana Pariwisata di Dinas Pariwisata Kabupaten Malang menjelaskan beberapa pihak yang dilibatkan didalam proses sosialisasi tersebut, antara lain:

“Kalau pihak-pihak yang kita ajak ketika proses sosialisasi rancangan peraturan daerah itu ada beberapa mas, seperti kita dari pihak dinas sendiri, lalu ada dari pihak polisi, kejaksaan, dan satpol PP. Kenapa kita mengajak mereka? Karena di salah satu rancangan peraturan daerah tersebut kan ada yang membahas tentang ijin usaha mas. Nah, kita beri penjelasan kepada mereka tentang pentingnya ijin usaha tersebut. Karena kalau sampai usaha mereka tidak terdaftar, mereka bisa terkena pidana mas. Nanti masalah pidana itu yang mengurus pihak dari polisi, kejaksaan, dan satpol PP itu tadi.” (Rahajoeningtias

Toeti, Kasi Pengendalian Usaha Jasa Sarana Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Malang, 20 Juli 2018)

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketika proses sosialisasi peraturan daerah tersebut, pihak Dinas Pariwisata selaku pelaksana teknis dilapangan menyertakan beberapa pihak seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Satpol PP. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat tentang bahaya apabila melanggar peraturan daerah tersebut ketika disahkan.

Bu Rahajoeningtias Toeti menambahkan penjelasannya sebagai berikut:

“Jadi dari kita dari pihak Dinas Pariwisata sendiri ada beberapa kegiatan teknis untuk mensosialisasikan peraturan daerah tersebut mas. Ada beberapa kegiatan dari kita yang arahnya itu ke pembinaan atau sosialisasi. Maksudnya pembinaan itu kita menjelaskan bagaimana maksud dari rancangan peraturan daerah tersebut. Contohnya di salah satu poin rancangan peraturan daerah tersebut ada yang membahas tentang izin mendirikan sebuah usaha, misalnya perhotelan. Jadi apabila ada pihak yang ingin mendirikan sebuah hotel, maka ada beberapa unsur yang harus dipenuhi, salah satunya unsur kesehatan. Nah, untuk bagaimana caranya menjadikan hotel tersebut menjadi sebuah hotel yang sehat, itu kita sosialisasikan kepada mereka mas. Nanti kalau mereka sudah memenuhi unsur tersebut, kita berikan sertifikat atau tanda yang menunjukkan bahwa hotel itu sudah layak disebut hotel yang sehat. Lalu kita jelaskan juga bagaimana pentingnya perijinan berkaitan dengan rancangan peraturan daerah tersebut. Contohnya kalo pelaku usaha harus mengurus ijin ini, ini, ini, nah nanti kita beri penjelasan yang sesuai dengan rancangan peraturan daerah tersebut. Nanti kalau seumpama tidak sesuai dengan apa yang ada di rancangan peraturan daerah tersebut atau tidak patuh, kita beri penjelasan sanksi apa yang akan mereka terima. Selain kita kumpulkan untuk proses sosialisasi, kita juga mendatangi mereka satu per satu. Tapi dari kedua cara sosialisasi tersebut, yang sering kita lakukan yaa mendatangi satu per satu. Karena kalau tidak kita yang inisiatif, biasanya mereka itu bandel mas. Untuk sekarang aja tempat usaha yang baru mendaftarkan usahanya baru sekitar 70%.” (Rahajoeningtias

Toeti, Kasi Pengendalian Usaha Jasa Sarana Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Malang, 20 Juli 2018)

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa proses sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak Dinas Pariwisata berupa proses pembinaan terhadap masyarakat terkait untuk memahami maksud dari rancangan peraturan daerah tersebut. Proses sosialisasi tersebut terbagi menjadi dua cara, yaitu dengan mengundang mereka untuk datang ke Dinas Pariwisata dan dengan cara pihak Dinas Pariwisata terjun ke lapangan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Pihak Dinas Pariwisata menjelaskan bahwa sosialisasi rancangan peraturan daerah dengan cara mendatangi masyarakat secara langsung dinilai lebih efektif dan tepat sasaran untuk masyarakat supaya mengerti dan memahami tentang rancangan peraturan daerah tersebut daripada mengundang mereka langsung untuk proses sosialisasi.

Selain pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata dan juga DPRD, tentunya rancangan peraturan daerah juga memerlukan masukan dari pihak masyarakat selaku sasaran dari dibentuknya peraturan daerah tersebut. Masyarakat di sekitar tempat wisata juga memiliki andil besar didalam proses pembentukan peraturan daerah tersebut.

Salah satu tempat wisata yang menjadi ikon di Kabupaten Malang sendiri adalah Candi Singosari. Candi Singosari yang merupakan situs peninggalan kerajaan Singhasari membutuhkan perhatian dari pemerintah supaya kelestarian nya tetap terjaga. Salah satu cara didalam menjaga

kelestarian situs tersebut adalah dengan memberikan peraturan yang mengikat didalam rancangan peraturan daerah tentang pariwisata tersebut.

Bapak “S” selaku salah satu pengelola Candi Singosari menjelaskan bagaimana partisipasinya selaku pengelola candi tersebut didalam memberikan masukan terhadap rancangan peraturan daerah tersebut:

“Kalau dari kita sih yaa masukannya lebih ke merawat bagaimana supaya candi ini tetap bersih, rapi sama juga menjaga supaya barang-barang peninggalan sejarah itu jangan sampai hilang ya gitu-gitu pokoknya mas. Kalau penilaian orang kan beda-beda mas. Ada yang menilai masukan kita itu bagus, ada yang bilang jelek. Kalau dari kita pengelola sendiri itu kan pengen menerima masukan-masukan dari masyarakat atau pengunjung ya mas. Itu kan supaya tempat wisata ini lebih baik lagi mas. Kalo dari kita kan supaya dapat menampung aspirasi mereka bisa langsung bilang ke saya selaku pengelola dan juga kita inisiatif mau bikin kotak surat mas. Kan tujuan kita baik ya mas, tapi gitu itu dari pihak pemerintah sendiri katanya salah mas. Suruh ijin ke mereka dulu mas katanya kalau ada apa-apa” (Bapak “S”, Petugas Pengelola Candi Singosari, 11 Juli 2018)

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa partisipasi dari pihak pengelola tempat pariwisata Candi Singosari tersebut berupa bagaimana supaya candi tersebut terawat dan terjaga. Pihak pengelola Candi Singosari sendiri sudah memiliki inisiatif untuk membuat semacam kotak saran yang digunakan untuk menampung aspirasi dari pengunjung candi tersebut. Namun hal tersebut terkendala ijin dari pihak pemerintah itu sendiri. Dapat diketahui bahwa masyarakat memberikan partisipasinya dalam bentuk materi. Dimana masyarakat memiliki inisiatif untuk memberikan materinya dalam hal ini mereka membuat sebuah kotak saran untuk menampung aspirasi dari setiap pengunjung yang datang.

c. Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat

Didalam proses pembentukan peraturan daerah, masyarakat memiliki hak untuk memberikan partisipasinya. Bentuk-bentuk dari partisipasi masyarakat pun memiliki berbagai macam bentuk. Tidak terkecuali dengan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata. Didalam pembentukan peraturan daerah tersebut juga terdapat berbagai macam bentuk partisipasi masyarakat didalamnya.

Dalam tahap sosialisasi rancangan peraturan daerah tersebut, pihak DPRD mengundang beberapa pihak yang terkait dengan rancangan peraturan daerah tersebut. Pihak-pihak terkait tersebut bisa memberikan masukan terhadap rancangan peraturan daerah tersebut. Namun, menurut penjelasan dari Bapak Agus Pitono sendiri pihak-pihak yang terkait tersebut masih kurang memberikan masukan terkait peraturan daerah yang sedang dirancang tersebut.

“Untuk pihak-pihak yang diundang didalam proses sosialisasi rancangan peraturan daerah tadi masih kurang dalam memberikan masukan atau aspirasinya. Untuk masukan yang berupa sumbangan pemikiran sendiri masih sedikit atau bahkan tidak ada. Rata-rata masukan dari mereka itu hanya berupa pembetulan redaksional, menambah atau mengurangi dasar hukum, atau pemikiran yang berada diluar konteks. Untuk masukan untuk substansinya sendiri itu masih kurang. Masukan-masukan hanya sekedar apa yang mereka harapkan dari diterapkannya peraturan daerah tersebut.” (Agus Pitono, Kepala Sub Bagian Produk Hukum DPRD Kabupaten Malang, 21 Juni 2018)

Bapak Sudarto selaku Staf Sub Bagian Produk Hukum juga memberikan penjelasannya terkait dengan bentuk-bentuk partisipasi

masyarakat didalam proses pembentukan peraturan daerah tersebut sebagai berikut:

“Yaa seperti yang dijelaskan Pak Agus tadi mas, kalau bentuk partisipasi mereka yaa cuman sebatas masukan-masukan saja. Masukan mereka pun juga sebatas cuman mengoreksi penulisan yang salah atau menambah dasar-dasar hukum. Kalau masukan yang untuk substansi didalam rancangan peraturan daerah tersebut saya rasa masih kurang mas. Kebanyakan dari mereka memberikan bagaimana harapan untuk rancangan peraturan daerah itu mas.” (Sudarto, Staf Sub Bagian Produk Hukum DPRD Kabupaten Malang, 21 Juni 2018)

Berdasarkan penjelasan diatas bisa diketahui bahwa masukan dari pihak-pihak terkait yang diundang oleh pihak DPRD didalam proses sosialisasi tersebut dinilai masih kurang. Masukan atau bentuk partisipasi yang mereka berikan hanya berupa hal-hal yang sekedar mengoreksi secara garis besar dari rancangan peraturan daerah tersebut. Seperti pembetulan untuk redaksional, menambah atau mengurangi dasar hukum, ataupun harapan mereka terhadap rancangan peraturan daerah yang akan diterapkan tersebut. Untuk masukan yang menyangkut substansi dari rancangan peraturan daerah tersebut sendiri masih kurang.



Gambar 7. Peserta Sosialisasi Memberikan Partisipasinya
Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Malang

Pihak Dinas Pariwisata selaku pelaksana teknis di lapangan terkait sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan juga menjelaskan tentang bentuk-bentuk partisipasi masyarakat didalam proses pembentukan peraturan daerah tersebut. Untuk masukan-masukan dari proses sosialisasi tersebut, Bu Rahajoeningtias Toeti selaku pihak dari Dinas Pariwisata menjelaskan bahwa terdapat beberapa masukan dari masyarakat itu sendiri, yaitu:

“Kalau dari masyarakat sendiri terdapat beberapa masukan mas. Seperti contohnya tadi yang didalam rancangan peraturan daerah tersebut kan ada yang membahas tentang ijin-ijin dari mendirikan usaha misalnya. Jadi kalau seumpama mau menerbitkan ijin itu kan pasti membutuhkan waktu ya mas. Nah, mereka memberikan masukan

untuk bagaimana caranya supaya didalam proses penerbitan ijin tersebut menjadi lebih cepat. Mempercepat waktu penerbitan ijin tersebut supaya usaha mereka cepat untuk berdiri. Lalu untuk pendirian sebuah tempat usaha itu kan ada kriteria atau poin-poin nya. Item-itemnya itu nanti dari masyarakat juga memberikan masukan mas.” (Rahajoeningtias Toeti, Kasi Pengendalian Usaha Jasa Sarana Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Malang, 20 Juli 2018)

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa masukan dari masyarakat ketika proses sosialisasi antara lain seperti bagaimana supaya waktu yang dibutuhkan ketika proses penerbitan ijin mendirikan sebuah tempat usaha tersebut bisa dipersingkat. Masyarakat juga memberikan masukan berupa koreksi terhadap syarat-syarat didalam mendirikan sebuah tempat usaha. Hal tersebut menandakan bahwa masyarakat lebih memberikan partisipasi mereka dalam bentuk sumbangan pemikiran terhadap rancangan peraturan daerah tersebut. Hal tersebut juga dapat menjadi penilaian bahwa masyarakat memiliki kepedulian terhadap rancangan peraturan daerah tersebut.

Selain pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata dan DPRD, masyarakat juga memiliki beberapa bentuk partisipasinya didalam proses pembentukan peraturan daerah ini. Bapak “S” selaku pengelola Candi Singosari memberikan penjelasannya mengenai bentuk-bentuk partisipasi masyarakat didalam pembentukan peraturan daerah sebagai berikut:

“Yaa dari kita kalau masukan-masukan itu banyak mas. Seperti tadi menjaga dan merawat kan. Contohnya kalau di jalan menuju candi itu kan ada paving ya mas, itu kalau seumpama rusak kita selaku pengelola yang membetulkan itu mas. Uang nya kita ambil dari sumbangan pengunjung ketika masuk ke tempat wisata. Sumbangan itu juga kita tarik seikhlasnya. Kita bandingkan dengan candi seperti Prambanan dan Borobudur, itu ada tarifnya, kita tidak mas. Terus ada contoh lagi seumpama perawatan rumput. Kalau rumputnya sudah

panjang kan inisiatif kita potong biar bagus, bersih, rapi. Itu memotong nya kan menggunakan mesin mas. Mesin itu kan butuh bensin juga mas. Itu bensin nya juga dari kita yang membeli sendiri. Ada juga soal penerangan. Itu lampu-lampu nya juga kita sendiri yang beli mas. Harga kebutuhan untuk itu juga tidak murah mas. (Bapak "S", Petugas Pengelola Candi Singosari, 11 Juli 2018)

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa masyarakat dalam hal ini petugas tempat pariwisata memiliki inisiatif didalam memberikan masukan ataupun didalam menjaga dan melestarikan tempat wisata yang mereka kelola. Masyarakat memiliki inisiatif yang tinggi didalam merawat dan menjaga tempat wisata tersebut dikarenakan mereka mengetahui bahwa masukan yang mereka berikan terhadap pemerintah tidak mendapat respon yang baik. Hal tersebut juga mendukung pernyataan yang sebelumnya dimana masyarakat dalam hal ini pengelola tempat wisata memberikan partisipasinya dalam bentuk sumbangan materi. Dimana didalam proses perawatan sebuah tempat wisata mereka menggunakan dana dari mereka sendiri untuk merawat tempat wisata tersebut.





Gambar 8. Bentuk Partisipasi Masyarakat Didalam Menjaga dan Merawat Tempat Wisata

Sumber: Dokumentasi Peneliti

d. Tingkatan Partisipasi Masyarakat

Terdapat berbagai bentuk partisipasi masyarakat didalam proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Selain bentuk partisipasi, didalam proses pembentukan peraturan daerah tersebut juga perlu diketahui bagaimana tingkatan partisipasi masyarakat didalam pembentukan peraturan daerah tersebut.

Tingkatan partisipasi tersebut berguna untuk mengetahui sejauh mana peran atau keterlibatan masyarakat didalam proses pembentukan peraturan daerah tersebut. Bapak Agus Pitono selaku Kepala Sub Bagian Produk Hukum DPRD Kabupaten Malang menjelaskan bagaimana tingkatan partisipasi masyarakat didalam proses pembentukan peraturan daerah tersebut sebagai berikut:

“Jadi untuk tingkatan partisipasi masyarakatnya sendiri menurut saya sudah baik yaa. Maksud saya sudah baik disini bagaimana masyarakat memiliki antusias yang baik didalam proses pembentukannya. Ketika

kita undang untuk proses sosialisasi pun mereka juga antusias untuk datang. Namun, memang masih terdapat beberapa kekurangan yaa mas didalam proses partisipasinya. Seperti yang saya jelaskan tadi kalau mereka ketika proses sosialisasi berlangsung hanya memberikan masukan berupa koreksi-koreksi kecil terhadap rancangan peraturan daerah tersebut. Jadi untuk pengaruh terhadap substansial dari rancangan peraturan daerah tersebut masih kurang yaa mas.” (Agus Pitono, Kepala Sub Bagian Produk Hukum DPRD Kabupaten Malang, 21 Juni 2018)

Bapak Sudarto selaku Staf Sub Bagian Produk Hukum DPRD Kabupaten Malang menambahkan penjelasan dari bapak Agus Pitono tersebut sebagai berikut:

“Jadi kalau melihat bagaimana partisipasi masyarakatnya ketika proses sosialisasi berlangsung, bisa dilihat kalau pengaruh partisipasi masyarakatnya terhadap substansi rancangan peraturan daerah ini masih kurang ya mas. Soalnya seperti yang dijelaskan pak Agus tadi kan masukan mereka hanya sekedar koreksi saja. Untuk masukan secara substansinya masih kurang.” (Sudarto, Staf Sub Bagian Produk Hukum DPRD Kabupaten Malang, 21 Juni 2018)

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat didalam proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata masih belum terlalu berpengaruh terhadap rancangan peraturan daerah tersebut. Hal tersebut dikarenakan partisipasi mereka berupa masukan terhadap rancangan peraturan daerah tersebut masih sebatas hanya koreksi-koreksi kecil terhadap rancangan peraturan daerah tersebut. Untuk masukan terhadap substansial dari rancangan peraturan daerah tersebut masih belum ada.

2. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata

Dalam proses pembentukan suatu peraturan daerah partisipasi masyarakat sangatlah diperlukan. Tapi didalam menghidupkan partisipasi masyarakat tersebut tidaklah mudah. Manusia adalah makhluk sosial yang saling berinteraksi satu sama lain, sehingga membutuhkan suatu dorongan dari berbagai pihak untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam sebuah kegiatan. Meski partisipasi masyarakat bukanlah satu-satunya kunci keberhasilan dari pencapaian tujuan dari pembentukan peraturan daerah bersama pihak lain, tetapi partisipasi masyarakat memiliki peran yang penting dalam langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Berikut faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata:

a. Faktor Pendukung

Menurut bapak Agus Pitono selaku Kepala Sub Bagian Produk Hukum DPRD menjelaskan bahwa salah satu faktor pendukung dari partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah tersebut adalah antusiasme yang tinggi dari pihak DPRD sendiri selaku pihak yang mengusulkan peraturan daerah tersebut maupun dari pihak-pihak yang diundang didalam proses sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Malang

Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata. Seperti yang dijelaskan beliau sebagai berikut:

“Kalau faktor pendukungnya sendiri mas, itu antusiasme yang sangat tinggi dari kita selaku pihak DPRD maupun dari pihak-pihak yang kita undang didalam proses sosialisasi yang kita laksanakan. Peraturan daerah ini kan yang menginisiasi dari kita pihak DPRD. Nah, jadi antusiasme dari kita sendiri itu sudah tinggi. Hal itu kita buktikan dengan bagaimana ketika kita mensosialisasikan rancangan peraturan daerah itu sendiri kita berusaha supaya pihak-pihak yang ada didalamnya atau yang kita undang dalam proses sosialisasi bisa ikut dalam kegiatan tersebut. Kita juga berupaya supaya rancangan peraturan daerah itu bisa dipahami oleh mereka. Dari pihak-pihak yang kita undang didalam proses sosialisasi tersebut juga memiliki antusiasme yang tinggi ya mas. Hal itu bisa terlihat dari bagaimana mereka cukup aktif didalam memberikan masukan terhadap rancangan peraturan daerah tersebut.”(Agus Pitono, Kepala Sub Bagian Produk Hukum DPRD Kabupaten Malang, 21 Juni 2018)

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu faktor pendukung dari pembentukan peraturan daerah tersebut adalah antusiasme yang tinggi dari pihak DPRD selaku pihak legislatif dan pihak yang menginisiasi peraturan daerah tersebut serta dari pihak-pihak yang terkait selaku pihak yang diundang didalam proses sosialisasi peraturan daerah tersebut.

Antusiasme yang tinggi tersebut dapat dibuktikan dengan pihak DPRD yang berusaha supaya pihak-pihak yang terkait dengan peraturan daerah tersebut dapat hadir dan mengerti dengan baik tentang rancangan peraturan daerah tersebut pada saat proses sosialisasi. Sedangkan antusiasme yang tinggi dari pihak yang diundang didalam proses sosialisasi rancangan peraturan daerah tersebut dapat dilihat dari aktifnya mereka didalam memberikan masukan terhadap rancangan peraturan daerah tersebut.

Faktor pendukung lain didalam proses pembentukan peraturan daerah tersebut adalah respon yang baik dari pihak DPRD terhadap setiap masukan dari peserta sosialisasi. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan dari bapak Agus Pitono selaku Kepala Sub Bagian Produk Hukum sebagai berikut:

“Faktor pendukung lain dari kita itu adalah respon dari kita itu baik mas. Maksudnya baik disini itu masukan-masukan yang ada atau yang masuk ketika kita melakukan proses sosialisasi itu langsung kita rapatkan lagi mas. Jadi masukan-masukan yang ada langsung kita jadikan bahan pertimbangan untuk koreksi atau tambahan didalam rancangan peraturan daerah itu sebelum disahkan.” (Agus Pitono, Kepala Sub Bagian Produk Hukum DPRD Kabupaten Malang, 21 Juni 2018)

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung lain didalam proses pembentukan peraturan daerah tersebut adalah respon yang baik dari pihak DPRD terhadap masukan-masukan ketika proses sosialisasi dilaksanakan. Masukan-masukan yang ada ketika proses sosialisasi tersebut ditanggapi untuk selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan didalam menyempurnakan rancangan peraturan daerah tersebut.

Selain faktor pendukung dari pihak DPRD, faktor pendukung juga dikemukakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selaku pelaksana teknis sosialisasi rancangan peraturan daerah tersebut di lapangan. Menurut Bu Rahajoeningtias Toeti selaku Kasi Pengendalian Usaha Jasa Sarana Pariwisata di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang menjelaskan tentang faktor pendukung didalam proses pembentukan peraturan daerah tersebut yaitu:

“Jadi untuk faktor pendukungnya sendiri seperti yang saya sebutkan tadi mas yaitu kita selain mengundang mereka untuk sosialisasi ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tentang peraturan daerah tersebut, kita juga melakukan sosialisasi dengan cara *door to door*. Maksudnya, kita mendatangi langsung ke lapangan atau ke tempat-tempat yang berkaitan dengan rancangan peraturan daerah tersebut untuk mensosialisasikan peraturan daerah tersebut. Karena kalau kita hanya mengundang mereka untuk datang kesini kan kita kurang tau mas gimana di lapangannya. Jadi untuk mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan, kita mendatangi mereka.” (Rahajoeningtias Toeti, Kasi Pengendalian Usaha Jasa Sarana Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Malang, 20 Juli 2018)

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu faktor pendukung didalam mensosialisasikan peraturan daerah tersebut adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang melakukan sosialisasi dengan dua cara, yaitu dengan mengundang pihak masyarakat untuk datang ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan dengan cara *door to door*, yaitu sosialisasi dengan cara mendatangi langsung atau terjun langsung ke lapangan. Sosialisasi dengan mendatangi masyarakat secara langsung bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi sebenarnya dilapangan.



Gambar 9. Sosialisasi Secara *Door to Door* oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Bu Rahajoeningtias menambahkan tentang faktor pendukung dari pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang sebagai berikut:

“Selain sosialisasi kita juga memberikan pembinaan kepada mereka mas. Contohnya seperti masalah tentang perizinan. Itu kita selain memberikan sosialisasi kepada mereka, kita juga memberikan bantuan kepada mereka kalau mereka ada kesulitan tentang memahami persoalan perizinan tersebut mas. Soalnya kalau tidak seperti itu, nanti waktu peraturan daerah tersebut diterapkan dan mereka tidak tahu tentang hal tersebut atau bingung kan mereka jadi kena tindak pidana mas. Kasihan merekanya juga kan.” (Rahajoeningtias Toeti, Kasi Pengendalian Usaha Jasa Sarana Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Malang, 20 Juli 2018)

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa selain memberikan sosialisasi tentang rancangan peraturan daerah tersebut, pihak Dinas Pariwisata selaku pelaksana teknis di lapangan juga memberikan

pembinaan kepada masyarakat khususnya yang berkaitan dengan perizinan. Pembinaan disini berupa pemberian bantuan seperti ketika masyarakat mengalami kesulitan didalam proses pengurusan izin dan sebagainya.

Selain faktor pendukung dari pihak DPRD dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, faktor pendukung juga didapat dari masyarakat dalam hal ini pengelola tempat wisata. Menurut bapak “S” selaku petugas pengelola tempat wisata Candi Singosari menjelaskan tentang faktor pendukung partisipasi masyarakat didalam pembentukan peraturan daerah tersebut:

“Kalau faktor pendukung ya seperti tadi mas. Kalau dari kita itu inisiatif nya sudah baik atau tinggi didalam memberikan masukan, kritik, atau saran kepada pihak pemerintah. Setiap ada permasalahan apapun kita pengennya juga langsung memberikan masukan kepada pemerintah.” (Bapak “S”, Petugas Pengelola Candi Singosari, 11 Juli 2018)

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa faktor pendukung dalam masyarakat berpartisipasi didalam pembentukan peraturan daerah tersebut adalah tingginya inisiatif masyarakat didalam memberikan masukan kepada pemerintah. Mereka memberikan masukan berdasarkan setiap permasalahan yang mereka hadapi dilapangan selama ini.

b. Faktor Penghambat

Dalam sebuah proses pembentukan peraturan daerah tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Faktor-faktor yang menghambat proses pembentukan sebuah peraturan daerah pasti muncul.

Namun faktor penghambat tersebut harus diperhatikan supaya kedepannya proses pembentukan sebuah peraturan daerah menjadi lebih baik lagi. Berikut faktor penghambat yang terjadi didalam proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata:

Faktor penghambat yang dikemukakan oleh bapak Agus Pitono selaku Kepala Sub Bagian Produk Hukum DPRD Kabupaten Malang adalah:

“Jadi waktu proses sosialisasi itu kita juga menghadapi kendala mas. Kendalanya lebih kepada dari kita sendiri mas. Salah satu bentuk kendalanya adalah waktu proses sosialisasi dimulai, pada hari itu juga file dari rancangan peraturan daerah itu baru dibagikan. Jadi pada saat itu juga peserta dari kegiatan sosialisasi baru bisa membacanya. Hal tersebut berpengaruh juga mas kepada masukan yang mereka berikan saat proses sosialisasi. Masukan mereka jadi kurang maksimal karena tidak dipelajari terlebih dahulu. Masukan dari mereka hanya berupa hal-hal seperti yang saya sebutkan tadi. Contohnya pembetulan redaksional, tentang dasar-dasar hukum, dan hal-hal yang diluar substansi dari rancangan peraturan daerah tersebut. Untuk masukan tentang substansi rancangan peraturan daerah itu sendiri masih kurang.” (Agus Pitono, Kepala Sub Bagian Produk Hukum DPRD Kabupaten Malang, 21 Juni 2018)

Dari penjelasan bapak Agus Pitono tersebut dapat diketahui bahwa salah satu hambatan yang ditemui pihak DPRD didalam proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata adalah terbatasnya waktu dari pihak-pihak yang diundang didalam proses sosialisasi rancangan peraturan daerah tersebut untuk memahami rancangan peraturan daerah yang akan disosialisasikan. Hal tersebut dikarenakan pemberian materi dari rancangan peraturan daerah tersebut dilakukan ketika proses sosialisasi tersebut dilakukan. Sehingga waktu untuk memahami dan memberikan

masukan sangat terbatas. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap masukan-masukan yang diberikan. Masukan-masukan yang diberikan terkesan hanya sebatas koreksi hal-hal kecil dari rancangan peraturan daerah tersebut. Untuk masukan yang bersifat substansif dirasa masih kurang.



Gambar 10. Pembagian File Ketika Proses Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah
Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Malang

Faktor penghambat lain yang ditemukan didalam proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata menurut bapak Agus Pitono selaku Kepala Sub Bagian Produk Hukum DPRD Kabupaten Malang adalah:

“Untuk hambatan lainnya selain pemberian materi tadi ya mas, itu adalah tentang keterbukaan kita didalam proses pembentukan

peraturan daerah itu sendiri. Jadi gini mas maksudnya, kita di DPRD sini sendiri kan ada web nya. Nah, ketika ada sebuah rancangan peraturan daerah tersebut, seperti peraturan daerah tentang pariwisata itu ya mas, itu kita kurang mengupload nya di web. Jadi masyarakat tidak mengetahui adanya rancangan peraturan daerah tersebut. Harusnya kalau seumpama rancangan peraturan daerah itu kita upload ke web kan tambah enak kita mendapat masukan dari masyarakat. Jadi masyarakat bisa mudah memberikan masukan ke kita selaku pihak DPRD tentang rancangan peraturan daerah itu mas.” (Agus Pitono, Kepala Sub Bagian Produk Hukum DPRD Kabupaten Malang, 21 Juni 2018)

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penghambat lain didalam partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah tersebut adalah kurang terbukanya informasi untuk masyarakat tentang rancangan peraturan daerah tersebut. Zaman yang semakin maju membuat kebutuhan akan keterbukaan informasi menjadi semakin besar. Namun, untuk rancangan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataannya itu sendiri masih belum terlaksana dengan baik. Web dari DPRD Kabupaten Malang yang seharusnya bisa digunakan masyarakat untuk memperoleh informasi dengan cepat masih belum berfungsi dengan baik. Berdasarkan hal tersebut, membuat partisipasi masyarakat didalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataannya masih kurang. Masyarakat masih kurang mengetahui tentang adanya rancangan peraturan daerah tersebut. Hal tersebut juga menuntut masyarakat untuk bergerak lebih aktif lagi didalam mencari informasi tentang rancangan peraturan daerah yang sedang dibuat oleh pihak DPRD.

Berkaitan dengan hambatan yang telah disampaikan diatas, bapak

Agus Pitono menambahkan:

“Berkaitan dengan urusan web tersebut mas, penyebabnya yaitu kurang komunikasi dari kita yaitu pihak dari DPRD dan dari pihak pemerintah yang di kantor kabupaten. Jadi rancangan peraturan daerah ini kan kita yang melaksanakan lah istilahnya. Tapi untuk yang mengurus web itu dari pihak pemerintah daerahnya mas. Jadi rancangan peraturan daerah yang akan dibuat itu tidak bisa kita upload langsung ke web. Jadi itu yang juga jadi salah satu penghambat kita juga mas.” (Agus Pitono, Kepala Sub Bagian Produk Hukum DPRD Kabupaten Malang, 21 Juni 2018)

Berdasarkan tambahan penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa faktor penghambat lain dari partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah tersebut adalah kurangnya koordinasi antara pihak dari DPRD dengan pihak dari pemerintah daerah Kabupaten Malang. Rancangan peraturan daerah yang dibuat oleh pihak DPRD tidak bisa langsung tersalurkan kedalam web supaya bisa dicermati langsung oleh masyarakat. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap estimasi waktu untuk memahami rancangan peraturan daerah tersebut.

Faktor penghambat selain ditemui oleh pihak DPRD maupun Dinas Pariwisata, juga ditemui oleh pihak masyarakat. Bapak “S” selaku petugas pengelola Candi Singosari menjelaskan beberap penghambat partisipasinya didalam peraturan daerah tersebut:

“Kalau penghambat yang saya rasakan sendiri itu yaa contohnya tadi kita ngasih masukan atau saran, itu respon dari pemerintah sendiri bisa dibilang kurang baik mas. Masukan dari kita juga seperti tidak ditanggapi. Jadi kita yang inisiatif kalau ada apa-apa kita usaha secara mandiri. Contoh kita ngasih masukan soal perawatan sama menjaga kelestarian itu kan mas. Itu dari pemerintah kalo memang lama, kita inisiatif buat merawat sendiri

pakai dana sendiri.” (Bapak “S”, Petugas Pengelola Candi Singosari, 11 Juli 2018)

Berdasarkan keterangan diatas dapat diketahui bahwa faktor penghambat yang ditemui didalam partisipasi masyarakat adalah kurang baiknya respon dari pemerintah didalam menanggapi masukan yang diberikan masyarakat. Masukan dari masyarakat yang terkait dengan menjaga dan melestarikan tempat wisata tersebut terkesan dibiarkan sehingga masyarakat tergerak secara mandiri didalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi.

Bapak “S” selaku petugas pengelola Candi Singosari menambahkan hal yang menghambat partisipasi masyarakat didalam peraturan daerah tersebut sebagai berikut:

“Kalau hal lain yang menghambat mungkin juga dari pemerintahnya jarang langsung ke lapangan ya mas. Jadi kita kalau ada masukan juga bingung kemananya. Mungkin cuman beberapa kali saja kesini buat ngecek gimana-gimananya. Kita juga kurang tau ya mas gimana cara mau ngasih masukan ke mereka. Prosedur atau alurnya gimana kita juga kurang tau mas” (Bapak “S”, Petugas Pengelola Candi Singosari, 11 Juli 2018)

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa hal penghambat lain partisipasi masyarakat didalam peraturan daerah tersebut adalah kurang aktifnya pemerintah untuk terjun langsung ke lapangan didalam menjaring aspirasi masyarakat. Selain itu masyarakat juga belum memahami bagaimana tata cara atau prosedur didalam mereka menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah.

C. Pembahasan

Dalam bagian ini akan dibahas mengenai bagaimana partisipasi masyarakat dan faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat didalam proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.

1. Partisipasi Masyarakat didalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata

Kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah/sedang diambil untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi atau tidak terjadi (Wilson, 2006:154).

Peraturan daerah merupakan salah satu bentuk kebijakan publik yang dibentuk oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah yang memiliki tujuan untuk mengatur dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Peraturan daerah harus dijadikan acuan bagi pemerintah daerah didalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Menurut Pasal 1 ayat 4 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menjelaskan bahwa Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya, yang

selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.

Fungsi dan kedudukan peraturan daerah berbeda antara yang satu dengan yang lainnya sesuai dengan materi atau muatan tergantung luas sempitnya urusan yang ada pada pemerintah daerah. Demikian juga terhadap mekanisme pembentukan dan pelaksanaan perubahan peraturan daerah sesuai dengan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah serta kondisi masyarakat dimana peraturan daerah tersebut diimplementasikan.

Selain peran aktif pemerintah didalam merumuskan peraturan daerah, peran atau partisipasi masyarakat juga diperlukan didalam pembentukan peraturan daerah. Menurut Salusu (1998:8), partisipasi secara garis besar dapat dikategorikan sebagai desakan kebutuhan psikologis yang mendasar pada setiap individu. Karena berdasarkan tujuan awal dari dibuatnya sebuah peraturan daerah adalah untuk mengatur dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dimana peraturan daerah tersebut diterapkan. Maka dari itu partisipasi masyarakat sangat diperlukan didalam pembentukannya. Bentuk-bentuk dan tingkatan partisipasi masyarakat didalam proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata adalah sebagai berikut:

a. Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat didalam pembentukan peraturan daerah sendiri diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang menyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam proses pembentukan Perda, Perkada, PB KDH dan/atau Peraturan DPRD.

Sedangkan Talizuduhu Ndraha dalam Febby Fajrurrahman (2007:43), menyatakan bentuk-bentuk partisipasi diantaranya berupa:

- a. Partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran
- b. Partisipasi dalam bentuk materi
- c. Partisipasi yang bersifat *skill* / keahlian
- d. Partisipasi dalam bentuk tenaga fisik

Berdasarkan peraturan pembentukan peraturan daerah dan teori bentuk partisipasi masyarakat tersebut, terdapat berbagai macam bentuk partisipasi masyarakat didalam proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata. Hal ini bisa dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dimana masyarakat memberikan masukan, kritik, dan saran didalam partisipasinya terhadap rancangan peraturan daerah yang sudah dibuat oleh DPRD selaku pihak legislatif. Masyarakat dapat memberikan partisipasinya didalam pembentukan peraturan daerah tersebut ketika proses sosialisasi rancangan peraturan daerah tersebut berlangsung.

Bentuk partisipasi masyarakat didalam pembentukan peraturan daerah tersebut yang pertama adalah bentuk partisipasi berupa sumbangan pemikiran. Bentuk partisipasi masyarakat didalam proses pembentukan peraturan daerah tersebut dapat dilihat ketika proses sosialisasi dilaksanakan oleh pihak DPRD Kabupaten Malang yang mengundang pihak-pihak SKPD yang terkait dengan rancangan peraturan daerah tersebut. Bentuk partisipasi berupa sumbangan pemikiran seperti memberikan masukan tentang pembetulan redaksional didalam rancangan peraturan daerah tersebut, menambah atau mengurangi dasar hukum, memberikan saran terkait permasalahan didalam rancangan peraturan daerah tersebut. Sedangkan masukan berupa sumbangan pemikiran ketika rancangan peraturan daerah tersebut disosialisasikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah masukan tentang merawat dan melestarikan sebuah tempat wisata atau cagar budaya.

Bentuk partisipasi masyarakat didalam proses pembentukan peraturan daerah tersebut yang kedua adalah bentuk partisipasi berupa materi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, partisipasi masyarakat dalam bentuk materi dapat diketahui ketika masyarakat dalam hal ini petugas pengelola Candi Singosari memberikan partisipasi materi berupa pembuatan kotak saran untuk menampung saran dari pengunjung tempat wisata tersebut serta biaya perawatan tempat wisata tersebut yang berasal dari uang sumbangan pengunjung ketika memasuki kawasan wisata tersebut. Selain itu, untuk perawatan tempat wisata tersebut,

pengelola Candi Singosari menggunakan dana dari mereka sendiri untuk melakukan perawatan tempat wisata tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka bentuk partisipasi masyarakat didalam proses pembentukan peraturan daerah tersebut masih berupa sumbangan pemikiran dan materi saja. Karena berdasarkan penjelasan dari beberapa informan tersebut masukan yang mereka berikan hanya ketika proses sosialisasi berlangsung. Untuk bentuk partisipasi masyarakat berupa *skill* / keahlian dan partisipasi berupa tenaga fisik, peneliti masih belum menemukan kedua bentuk partisipasi masyarakat tersebut.

b. Tingkatan Partisipasi Masyarakat

Arenstein (Ahmad, 2003:108), menyusun model yang dapat membantu untuk menilai tingkat partisipasi didalam suatu proses pembentukan kebijakan atau peraturan secara umum perundang-undangan atau peraturan daerah. Secara umum ada tiga derajat partisipasi masyarakat, antara lain:

1. Tidak partisipatif (*Non participation*)
2. Derajat semu (*Degrees of tokenism*)
3. Kekuatan masyarakat (*Degrees of citizen power*)

Dari tiga tingkat partisipasi tersebut dibagi kedalam tingkatan-tingkatan lagi. Tingkatan tidak partisipatif (*Non participation*) terdiri dari dua tingkat partisipasi yaitu manipulasi (*manipulation*) dan terapi (*therapy*). Dalam tingkatan ini hanya bertujuan untuk menata masyarakat dan mengobati luka yang timbul akibat dari kegagalan sistem dan

mekanisme pemerintahan. Derajat semu terdiri dari tiga tingkat partisipasi, yaitu pemberitahuan (*informing*), konsultasi (*consultation*), dan peredaman (*placation*). Didalam tahap ini masyarakat sudah bisa mendengar (tingkat pemberitahuan) dan didengar (tingkat konsultasi), namun tahap ini belum menyediakan jaminan yang jelas bagi masyarakat bahwa pendapat mereka diperhitungkan didalam penentuan hasil sebuah kebijakan publik.

Derajat tertinggi yaitu kekuatan masyarakat terdiri dari tiga tingkat partisipasi yaitu kemitraan (*partnerships*), delegasi kekuasaan (*delegated power*), dan yang teratas adalah kendali masyarakat (*citizen control*). Pada tahap ini masyarakat secara politik maupun administratif sudah mampu mengendalikan proses, pembentukan, pelaksanaan, dan kebijakan tersebut.

Untuk ringkasnya ditampilkan dalam bagan sebagai berikut:

Delapan Tingkat Partisipasi Masyarakat

1.	Kendali masyarakat (<i>citizen control</i>)	<i>Degrees of Citizen Power</i> (Kekuasaan Masyarakat)
2.	Delegasi Kekuasaan (<i>delegated power</i>)	
3.	Kemitraan (<i>partnership</i>)	
4.	Peredaman (<i>placation</i>)	<i>Degrees Tokenism</i> (Semu)
5.	Konsultasi (<i>consultation</i>)	
6.	Penginformasian (<i>information</i>)	<i>Nonparticipation</i> (Tidak Partisipasi)
7.	Terapi (<i>therapy</i>)	
8.	Manipulasi (<i>manipulation</i>)	

Berdasarkan penjelasan tentang tingkatan partisipasi masyarakat tersebut, maka partisipasi masyarakat didalam proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata termasuk kedalam tingkatan derajat semu (*degrees of tokenism*). Pihak DPRD Kabupaten Malang sudah melaksanakan proses konsultasi terhadap rancangan peraturan daerah tersebut. Partisipasi atau masukan dari masyarakat didalam proses pembentukan peraturan daerah tersebut sudah bisa didengar atau berada dalam tahap konsultasi. Namun, dikarenakan masukan dari masyarakat masih belum maksimal, maka masukan dari masyarakat tersebut belum banyak diperhitungkan atau berpengaruh didalam penentuan hasil pembentukan peraturan daerah tersebut.

Hal ini bisa dilihat dari hasil penelitian bahwa masyarakat sudah memberikan masukannya didalam proses pembentukan peraturan daerah tersebut ketika proses sosialisasi rancangan peraturan daerah tersebut berlangsung. Namun masukan atau partisipasi mereka belum terlalu mempengaruhi kedalam rancangan peraturan daerah tersebut. Hal ini dikarenakan masukan terhadap substansi dari rancangan peraturan daerah tersebut masih kurang. Serta masukan yang diberikan oleh masyarakat masih kurang mendapat respon yang baik dari pihak pemerintah sendiri.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata

Dalam proses pembentukan suatu peraturan daerah, partisipasi masyarakat sangatlah diperlukan. Tetapi didalam menghidupkan partisipasi masyarakat tersebut tidaklah mudah. Manusia adalah makhluk sosial yang saling berinteraksi satu sama lain, sehingga membutuhkan suatu dorongan dari berbagai pihak untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam sebuah kegiatan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat menyimpulkan apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat didalam proses pembentukan peraturan daerah tersebut. Faktor pendukung dan penghambat tersebut antara lain:

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung partisipasi masyarakat didalam proses pembentukan peraturan daerah tersebut antara lain:

1. Adanya keinginan dari masyarakat untuk berpartisipasi

Semangat dan keinginan dari masyarakat didalam proses pembentukan peraturan daerah tersebut dapat dilihat dari bagaimana keaktifan mereka didalam proses sosialisasi tentang rancangan peraturan daerah tersebut. Masyarakat bergerak aktif didalam memberikan masukannya untuk penyempurnaan rancangan peraturan daerah yang dibentuk.

2. Sosialisasi yang baik dari pihak pemerintah

Pihak DPRD selaku pihak legislatif yang membuat rancangan peraturan daerah tersebut melakukan sosialisasi dengan mengundang beberapa pihak yang terkait dengan peraturan daerah tersebut. Sedangkan pihak Dinas Pariwisata selaku pelaksana teknis di lapangan melaksanakan sosialisasi dengan dua metode, yaitu dengan mengundang masyarakat untuk diberikan sosialisasi terhadap rancangan peraturan daerah tersebut serta dengan metode *door to door* atau mendatangi pihak masyarakat untuk diberikan sosialisasi terkait rancangan peraturan daerah tersebut.

b. Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan beberapa faktor penghambat didalam partisipasi masyarakat didalam proses pembentukan peraturan daerah tersebut antara lain:

1. Waktu pembagian file rancangan peraturan daerah

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa file rancangan peraturan daerah yang digunakan untuk materi sosialisasi baru dibagikan ketika proses sosialisasi dilaksanakan. Hal ini berpengaruh terhadap waktu pihak yang diundang ketika proses sosialisasi untuk memahami materi yang akan dibahas. Sehingga masukan yang diberikan menjadi kurang maksimal.

2. Keterbukaan tentang rancangan peraturan daerah tersebut.

Hal ini dikarenakan rancangan peraturan daerah yang dibuat tidak diberikan kepada masyarakat diluar proses sosialisasi yang dilakukan. Sehingga masyarakat tidak bisa mengetahui rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas oleh pihak pemerintah maupun DPRD.

3. Respon dari pemerintah yang kurang baik

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap pihak masyarakat, menunjukkan bahwa masyarakat sudah aktif didalam memberikan masukan, kritik, dan saran terhadap rancangan peraturan daerah tersebut. Namun, masukan yang mereka berikan tidak mendapat respon yang baik dari pihak pemerintah. Sehingga masukan dari mereka tidak terlalu berpengaruh terhadap rancangan peraturan daerah tersebut.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Peraturan daerah merupakan salah satu bentuk kebijakan publik yang dibentuk oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah yang memiliki tujuan untuk mengatur dan memberikan kesejahteraan untuk masyarakat. Peraturan daerah harus dijadikan acuan bagi pemerintah daerah didalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peraturan daerah yang selanjutnya disebut perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.

Selain peran aktif pemerintah didalam merumuskan peraturan daerah, peran atau partisipasi masyarakat juga diperlukan didalam pembentukan peraturan daerah. Partisipasi didalam proses pembentukan peraturan daerah sudah diatur didalam undang-undang yang menyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan baik secara lisan dan/atau tertulis. Kabupaten Malang sebagai kabupaten terluas kedua di Jawa Timur, juga menerapkan prinsip partisipasi masyarakat didalam proses pembentukan peraturan daerahnya.

Salah satu peraturan daerah di Kabupaten Malang yang menggunakan partisipasi masyarakat didalam pembentukannya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2013 tentang

Penyelenggaraan Kepariwisata. Didalam pembentukan peraturan daerah tersebut terdapat beberapa tahap yang harus dilakukan. Masyarakat bisa berpartisipasi ketika proses sosialisasi rancangan peraturan daerah tersebut berlangsung.

Untuk masukan dari masyarakat terhadap rancangan peraturan daerah tersebut masih sekedar masukan secara lisan saja. Masukan dari masyarakat seperti pembetulan redaksional didalam rancangan peraturan daerah tersebut, menambah atau mengurangi dasar hukum, memberikan saran terkait permasalahan didalam rancangan peraturan daerah tersebut, dan masukan tentang merawat dan melestarikan sebuah tempat wisata atau cagar budaya.

Untuk partisipasi masyarakat didalam proses pembentukan peraturan daerah tersebut masih berada didalam tingkatan derajat semu (*degrees of tokenism*). Dimana partisipasi atau masukan dari masyarakat sudah bisa didengar atau berada didalam tahap konsultasi. Namun, masukan atau partisipasi dari masyarakat masih belum banyak diperhitungkan didalam penentuan hasil pembentukan peraturan daerah tersebut.

Terdapat beberapa faktor pendukung yang mempengaruhi partisipasi masyarakat didalam proses pembentukan peraturan daerah tersebut, antara lain:

1. Adanya keinginan dari masyarakat untuk berpartisipasi
2. Sosialisasi yang baik dari pihak pemerintah

Selain faktor pendukung, terdapat pula faktor penghambat partisipasi masyarakat didalam proses pembentukan peraturan daerah tersebut, antara lain:

1. Waktu pembagian file rancangan peraturan daerah
2. Keterbukaan tentang rancangan peraturan daerah tersebut.
3. Respon dari pemerintah yang kurang baik

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap partisipasi masyarakat didalam proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Berdasarkan faktor penghambat yang disebutkan diatas, maka saran yang pertama adalah waktu untuk pembagian file rancangan peraturan daerah. Mungkin file rancangan peraturan daerah bisa dibagikan jauh-jauh hari sebelum proses sosialisasi rancangan peraturan daerah tersebut dilaksanakan. Sehingga pihak yang diundang didalam proses sosialisasi tersebut memahami isi dari rancangan peraturan daerah tersebut.
2. Saran yang selanjutnya adalah pihak DPRD maupun pemerintah lebih memanfaatkan teknologi yang ada. Berdasarkan hasil wawancara yang didapat oleh penulis, diketahui bahwa sebenarnya untuk DPRD sendiri sudah memiliki sebuah *website* yang bisa digunakan untuk

berkomunikasi dengan masyarakat. Rancangan peraturan daerah yang dibentuk mungkin bisa dimasukkan kedalam *website* tersebut supaya masyarakat luas bisa memberikan masukan terkait rancangan peraturan daerah tersebut.

3. Memberikan respon yang baik terhadap masukan-masukan yang diberikan oleh masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat diketahui bahwa sebenarnya masyarakat memiliki masukan-masukan yang bagus untuk ditindaklanjuti. Namun karena respon dari pemerintah kurang baik, maka masukan tersebut menjadi tidak maksimal.
4. Baik dari pihak pemerintah maupun DPRD untuk lebih sering terjun ke lapangan. Berdasarkan hasil penelitian diatas, masyarakat merasa bahwa pemerintah kurang terjun ke lapangan untuk menggali masukan dari masyarakat. Masyarakat sendiri yang memiliki masukan terhadap rancangan peraturan daerah tersebut tidak mengetahui bagaimana mekanisme untuk menyampaikan aspirasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Winarno, Budi, 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Yogyakarta: Caps Publishing.
- Indiahono, Dwiyanto, 2017. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Wahab, Solihin Abdul, 2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Abidin, Zainal, 2012. *Kebijakan Publik Edisi 2*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Muluk, Khairul, 2007. *Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Hamidi, Jazim. 2007. *Pedoman Naskah Akademik Partisipatif*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Saifudin, 2009. "Proses Pembentukan Undang-Undang: Studi tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang". Dalam *Jurnal Hukum*, 16 (Edisi Khusus), hal. 95-117, 2009.
- Praptanugraha, 2008. "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah". Dalam *Jurnal Hukum*, 15(3), hal. 459-473, 2008.

Rumesten, Eza, 2012. "Model Ideal Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah". Dalam *Jurnal Dinamika Hukum*. 12(1), hal.136-147, 2012.

Warouw, Alex, 2014. "Tugas dan Tanggung Jawab Masyarakat dalam Pembentukan Perda". Dalam *Lex Administration*, 1(2), hal.5-12, 2014.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Abidin, Zainal, 2016. *Kebijakan Publik Edisi 3*. Jakarta: Salemba Humanika.

Putri, Isnabea Fatmalanuary, 2017. *Efektifitas Penerapan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2013 Terkait Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Kepariwisataaan*. Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Rosyid, Bakti Maulana, 2015. *Pelaksanaan Pasal 9 Huruf (b) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan Terkait Pembangunan Destinasi Pariwisata di Kabupaten Malang*. Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Zein, Yahya Ahmad, *et al.*, 2016. *Legislative Drafting: Rancangan Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Thafamedia.

Halim, Hamzah, dan Putera, Kemal Redindo S., 2009. *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.



LAMPIRAN

DRAFT WAWANCARA

A. Pihak DPRD

1. Bagaimana proses pembentukan sebuah peraturan daerah secara umum?
2. Bagaimana proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata?
3. Bagaimana masyarakat bisa berpartisipasi didalam proses pembentukan peraturan daerah tersebut?
4. Siapa saja pihak yang terlibat didalam proses pembentukan peraturan daerah tersebut?
5. Apa saja bentuk-bentuk partisipasi masyarakat didalam pembentukan peraturan daerah tersebut?
6. Apa saja faktor pendukung dan penghambat didalam proses pembentukan peraturan daerah tersebut?

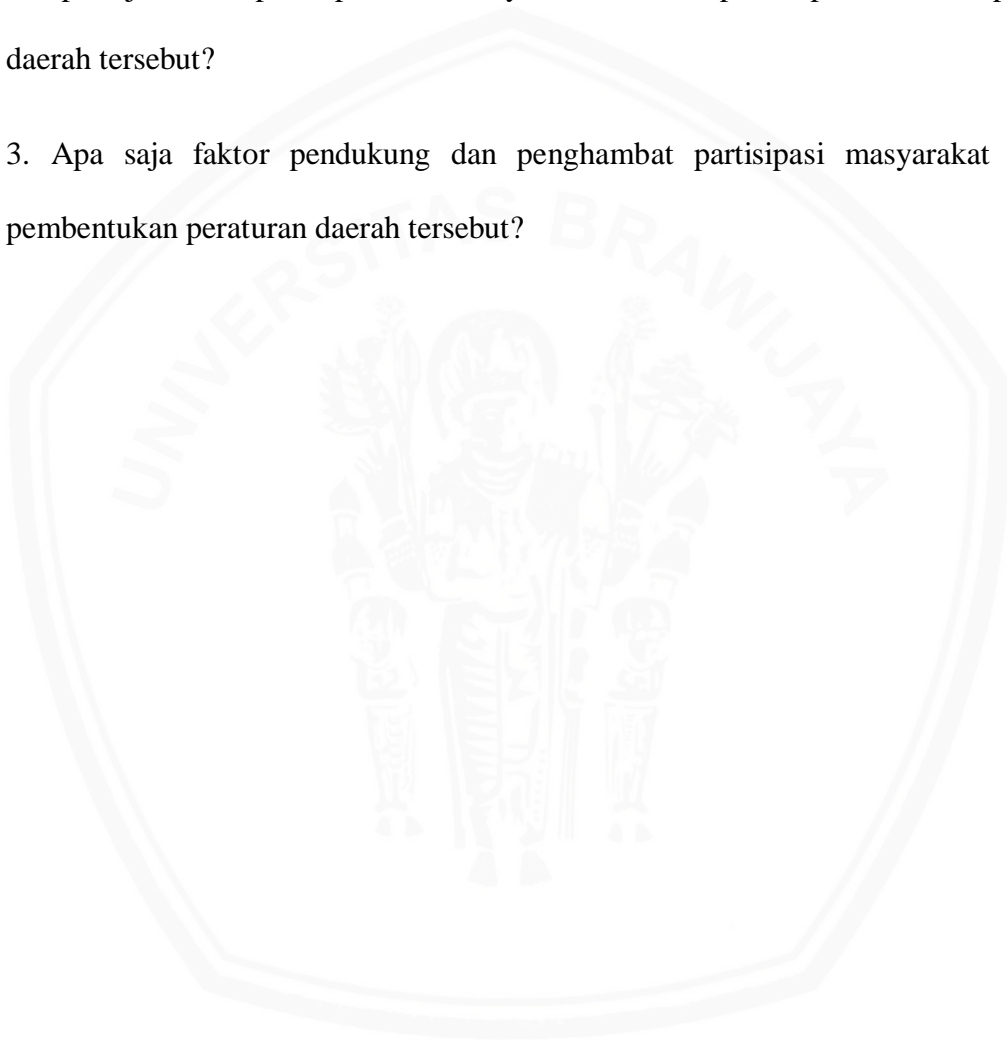
B. Pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1. Bagaimana partisipasi masyarakat didalam proses pembentukan peraturan daerah tersebut?
2. Siapa saja pihak yang terlibat didalam proses sosialisasi rancangan peraturan daerah tersebut?
3. Apa saja bentuk partisipasi masyarakat dalam proses sosialisasi rancangan peraturan daerah tersebut?

4. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam proses sosialisasi tersebut?

C. Pihak Masyarakat

1. Bagaimana selama ini partisipasi masyarakat didalam proses pembentukan peraturan daerah tersebut?
2. Apa saja bentuk partisipasi dari masyarakat didalam proses pembentukan peraturan daerah tersebut?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat didalam pembentukan peraturan daerah tersebut?





PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl. KH. Agus Salim No. 7 Telp. (0341) 366260 Fax. (0341) 366260
 Email: bakesbangpol@malangkab.go.id – Website: <http://www.malangkab.go.id>
MALANG - 65119

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 072/ 3525 /35.07.207/2018

Untuk melakukan Survey/Research/Penelitian/KKN/PKL/Magang

Menunjuk : Surat dari Dekan Fakultas Administrasi Universitas Brawijaya Nomor:
 7997/UN10.F03.11.11/PN/2018 Tanggal: 3 Juli 2018 Perihal: Survey

Dengan ini Kami **TIDAK KEBERATAN** dilaksanakan **Ijin Survey** oleh;

Nama / Instansi : Luthfi Kamil

Alamat : Jl. MT.Haryono

Thema/Judul/Survey/Research : Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan
 Daerah Kabupaten Malang nomor 10 Tahun 2013
 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata

Daerah/tempat kegiatan : di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Malang

Lamanya : 1 Bulan

Pengikut :

Dengan Ketentuan :

1. Mentaati Ketentuan - Ketentuan / Peraturan yang berlaku
2. Sesampainya ditempat supaya melapor kepada Pejabat Setempat
3. Setelah selesai mengadakan kegiatan harap segera melapor kembali ke Bupati Malang Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang
4. Surat Keterangan ini tidak berlaku apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas

Malang, 4 Juli 2018

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MALANG

Kepala Bidang Ideologi, HAM dan Wasbang



Tembusan :
Yth. Sdr.

NIP.19680125 199203 1 004

1. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
2. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kab. Malang;
3. Mhs/Ybs;
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl. KH. Agus Salim No. 7 Telp. (0341) 366260 Fax. (0341) 366260
M A L A N G - 6 5 1 1 9

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 072/3896 /35.07.205/2017

Untuk melakukan Survey/Research/Penelitian/KKN/PKL/Magang

Menunjuk : Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
 Nomor:18023/UN10.F03.11.11/PN/2017 Tanggal:6 Desember 2017 Perihal:Ijin Riset/Survey

Dengan ini Kami **TIDAK KEBERATAN** dilaksanakan Ijin Riset oleh:

Nama / Instansi	: Luthfi Kamil
Alamat	: Jl MT.Haryono 163 Malang
Thema/Judul/Survey/Research	: Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah (Perda)
Daerah/tempat kegiatan	: Di Kantor DPRD Kab.Malang
Lamanya	: 1 Minggu
Pengikut	: -

Dengan Ketentuan :

1. Mentaati Ketentuan - Ketentuan / Peraturan yang berlaku
2. Sesampainya ditempat supaya melapor kepada Pejabat Setempat
2. Setelah selesai mengadakan kegiatan harap segera melapor kembali ke Bupati Malang Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang
3. Surat Keterangan ini tidak berlaku apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas

Malang, 08 Desember 2017

An. KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK

Kepala Bidang Ideologi, HAM dan Wasbang

asubid Wawasan Kebangsaan

KUSWANTORO
 Penata
 NIP. 1980125 199203 1 004

Tembusan :

Yth.

1. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi UB Malang
2. Ketua Sekertaris Dewan DPRD Kab.Malang
3. Mhs/Ybs
4. Arsip





PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. KH. Agus Salim No. 7 Telp. (0341) 366260 Fax. (0341) 366260
Email: bakesbangpol@malangkab.go.id – Website: <http://www.malangkab.go.id>
MALANG - 65119

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 072/ 1256 /35.07.207/2018

Untuk melakukan Survey/Research/Penelitian/KKN/PKL/Magang

Menunjuk : Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Nomor:
4664/UN10.F03.11.11/PN/2018 Tanggal: 11 April 2018 Perihal: Ijin Riset/Survey

Dengan ini Kami **TIDAK KEBERATAN** dilaksanakan **Ijin Riset** oleh:

Nama / Instansi : Luthfi Kamil

Alamat : Jl. MT. Haryono 163 Malang

Thema/Judul/Survey/Research : Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan
Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2013
Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata

Daerah/tempat kegiatan : di Sekretariat DPRD Kab. Malang

Lamanya : 2 Bulan

Pengikut : -

Dengan Ketentuan :

1. Mentaati Ketentuan - Ketentuan / Peraturan yang berlaku
2. Sesampainya ditempat supaya melapor kepada Pejabat Setempat
3. Setelah selesai mengadakan kegiatan harap segera melapor kembali ke Bupati Malang Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang
4. Surat Keterangan ini tidak berlaku apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas

Malang, 16 April 2018

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MALANG
Sekretaris

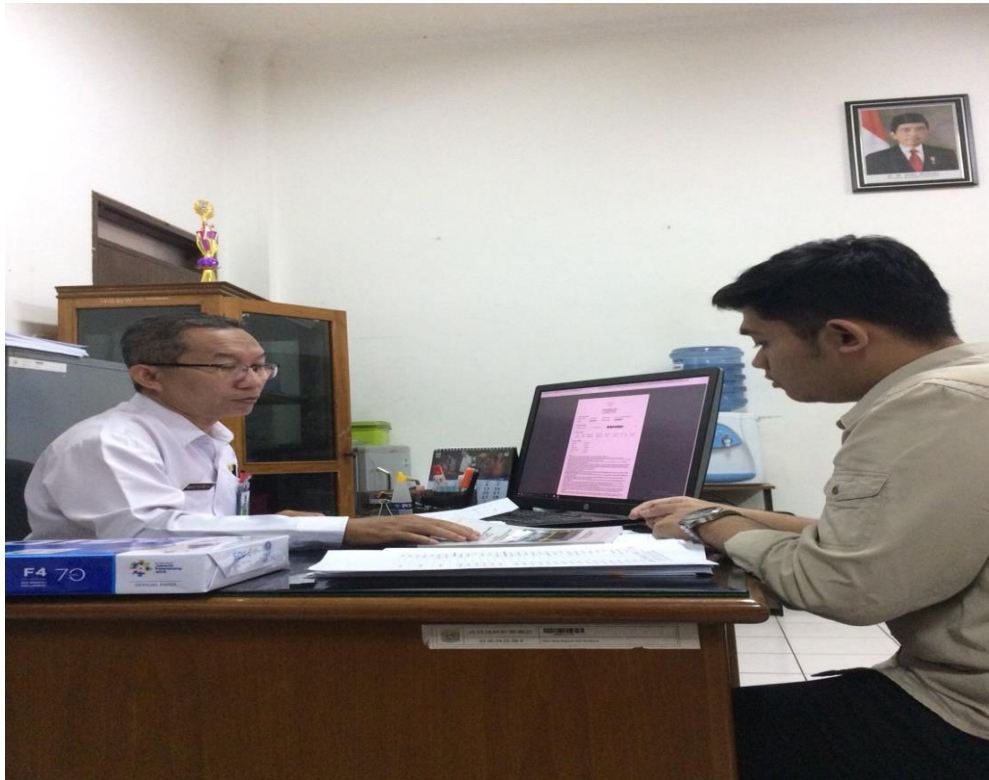


Tembusan :

Yth. Sdr.

1. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi UB;
2. Sekretaris DPRD Kab. Malang;
3. Mhs/Ybs;
4. Arsip.

Lampiran Dokumentasi Penelitian



Peneliti Melakukan Wawancara dengan Bapak Agus Pitono selaku Kepala Sub Bagian Produk Hukum DPRD Kabupaten Malang



**Peneliti Melakukan Wawancara dengan Bapak Sudarto selaku Staff Sub Bagian
Produk Hukum DPRD Kabupaten Malang**



**Peneliti Melakukan Wawancara dengan Ibu Rahajoeningtias Toeti selaku Kasi
Pengendalian Usaha Jasa Sarana Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**



**Peneliti Melakukan Wawancara dengan Bapak Suyanto selaku Pengelola Kawasan
Wisata Candi Singosari**

